

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR
DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN
TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP NEGERI 1 SEMIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh
Rini Septiani Astuti
NIM 12110241023

**PROGRAM STUDI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
JURUSAN FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DESEMBER 2016**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN” yang disusun oleh Rini Septiani Astuti NIM 12110241023 ini telah disetujui pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 30 September 2016

Pembimbing

Drs. I Made Suatera M.Si.
NIP. 19530402 198003 1 002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

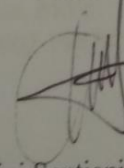
Nama : Rini Septiani Astuti
NIM : 12110241023
Program Studi : Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri
Yogyakarta

menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, karya ilmiah ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 21 November 2016

Penulis,



Rini Septiani Astuti

NIM 12110241023

PENGESAHAN

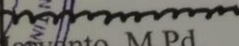

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN” yang disusun oleh Rini Septiani Astuti, NIM 12110241023 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 1 November 2016 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Drs. I Made Suatera, M. Si.	Ketua Penguji		21/11/2016
Dr. Arif Rohman, M. Si.	Sekretaris Penguji		14/11/2016
Dr. Cepi Safruddin A.J., M. Pd.	Penguji Utama		14/11/2016

Yogyakarta, 16 DEC 2016
Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta




Dr. Hayanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001 

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS: An- Nahl: 90)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan anugerahNya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa serta pengorbanannya.
2. Para Dosen yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing.
3. Alamamater tercinta, Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Agama, Nusa dan Bangsa.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR
DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016 DI SMP N 1 SEMIN**

Oleh
Rini Septiani Astuti
NIM 12110241023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan serta faktor pendukung dan penghambat implementasi KIP.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah staf bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, Kepala Sekolah dan Guru BK SMP N 1 Semin, empat orang siswa penerima KIP, serta empat orang tua siswa penerima KIP. Objek penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yang memiliki kartu KIP sebanyak 161 siswa. KIP adalah bantuan berupa uang tunai diberikan kepada siswa yang orang tuanya tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya. Hasil dari pelaksanaan KIP dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan siswa yang menerima dana KIP memenuhi kriteria kondisi keluarga siswa yang ditentukan dari kepemilikan KPS sehingga siswa yang tidak bersekolah atau pendidikannya terhalang biaya dapat bersekolah serta terwujudnya pendidikan yang merata. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan pada mekanismenya, penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, Kartu Indonesia Pintar, Pemerataan Pendidikan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang begitu berarti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam program studi Kebijakan Pendidikan, jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga penulis ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, atas segala kebijaksanaannya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk studi di kampus tercinta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Filsafat Sosiologi Pendidikan yang telah memberikan pengarahan selama menempuh studi.
4. Bapak Drs. I Made Suatera, M.Si selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Prodi Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan selama kuliah di UNY.
6. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian.

7. Staff Bidang Pendidikan Lanjutan Pertama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul yang telah bersedia memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepala Sekolah, Staf TU, Guru BK, siswa, dan orang tua siswa SMP N 1 Semin yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan informasi bagi penulis.
9. Seluruh teman- teman Prodi Kebijakan Pendidikan angkatan 2012 yang selalu memberikan dukungan positif bagi penulis.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari tulisan ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Terimakasih.

Yogyakarta, 21 November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Hakikat Kebijakan Pendidikan.....	14
1. Kebijakan	14
2. Pendidikan	15
3. Kebijakan Pendidikan	17
4. Proses Kebijakan Pendidikan.....	18
B. Implementasi Kebijakan Pendidikan	19
1. Pengertian Implementasi	19
2. Konsep Implementasi Kebijakan	22

3. Teori-teori Implementasi	23
C. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar	30
D. Pemerataan Pendidikan	46
E. Penelitian yang Relevan	53
F. Kerangka Pikir	55
G. Pertanyaan Penelitian	58
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	59
B. Jenis Penelitian	59
C. Subjek dan Obyek Penelitian	60
D. Tempat dan Waktu Penelitian	61
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Instrumen Penelitian	63
G. Teknik Analisis Data	66
H. Keabsahan Data.....	68
BAB 1V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil SMP N 1 Semin	70
B. Hasil Penelitian	76
1. Implementasi Kebijakan KIP di SMP N 1 Semin	76
2. Implemetasi KIP dalam Upaya Pemerataan Pendidikan	78
a. Pengorganisasian KIP	80
b. Interpretasi KIP	85
c. Aplikasi KIP	87
d. Faktor Pendukung dan Penghambat	88
C. Pembahasan	90
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Besaran Dana	37
Tabel 2. Mekanisme Pengambilan Dana.....	43
Tabel 3. Kisi- kisi instrumen observasi.....	64
Tabel 4. Kisi- kisi Instrumen wawancara.....	65
Tabel 5. Kisi- kisi dokumentasi	66
Tabel 6. Pendidikan terakhir guru	73
Tabel 7. Data jumlah siswa di SMP N 1 Semin	74
Tabel 8. Data Ruang Penunjang.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Hasil Dokumentasi	111
Lampiran 2. Hasil Observasi	112
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	118
Lampiran 4. Transkrip Wawancara yang Direduksi	123
Lampiran 5. Pengolahan Data	126
Lampiran 6. Catatan Lapangan	144
Lampiran 7. Dokumentasi	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek penting yang dianggap sangat menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Melalui pendidikan yang mencukupi, kita dapat hidup dengan layak seperti yang diharapkan. Tentunya harapan manusia dimasa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan dan sekaligus perubahan pola hidup kepada peserta didik. Mohammad Saroni (2013: 9) menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai satu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya dalam PP 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3 a bahwa penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP 25 Tahun 2005, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik “orang kaya” maupun ”orang miskin” dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

Menurut Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat

(1) menyatakan bahwa :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetisi global.

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan mengupayakan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia. Arif Rohman (2009:245) menyebutkan bahwa masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan. Oleh karena itu,

penyelenggaraan pendidikan wajib diselenggarakan oleh pemerintah secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia.

Kesempatan warga miskin untuk mendapatkan pendidikan pun nampaknya masih belum merata. Hadi Supeno (1999: 11) menyatakan bahwa pendidikan yang dulunya begitu mulia, yakni melepaskan rakyat dari cengkeraman kemelaratan, kini telah menjadi alat dari sistem masyarakat kapitalis. Pendidikan hanyalah milik mereka yang berduit, dan mereka yang berasal dari kelas menengah dan atas. Pendidikan telah menjadi barang mewah, dengan harga yang begitu mahal. Pasal 34 UUD 1945 telah menjamin bahwa fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kalimat tersebut jika kita kaji pada tataran empiris sehari-hari hanyalah sebuah cita – cita yang tidak tahu sampai kapan akan merata sampai pada lapisan masyarakat paling bawah khususnya masyarakat miskin. Muhammad Saroni (2013: 7) menyebutkan bahwa para elite politik di tingkat pusat maupun daerah masih bergelut pada kepentingan masing – masing sehingga kepentingan kaum miskin yang menjadi amanat tugas mereka malah terabaikan. Akibatnya, kaum miskin terpaksa berjuang sendiri berhadapan dengan dinamika kehidupan yang memperlihatkan muka tak ramah di hadapan mereka.

Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Menurut Muhammad Saroni (2013: 27) menyatakan bahwa mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit.

Masyarakat kelompok lapisan ini sering harus rela menjadi penonton di pinggir lapangan pendidikan sebab tidak mampu membeli karcis untuk kursi penonton yang nyaman. Mereka tidak mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Laporan kinerja Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 532.590 orang atau sebesar 14,55% dari total penduduk DIY. Selama kurun waktu 2010-2014, kemiskinan di DIY baik dari sisi jumlah maupun persentase 2011 jumlah penduduk miskin DIY tercatat sebanyak 568,05 ribu orang atau 16,14% menurun menjadi sebanyak 532,59 ribu orang atau 14,55 pada periode September 2014 (Laporan kinerja Pemda DIY tahun 2014). Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki prosentase kemiskinan rendah yakni 23,03% atau 157,09 ribu pada tahun 2011 dan menurun menjadi 20,83% atau 148,39 ribu orang pada periode 2014. Penurunan selama tiga tahun tersebut (2,2%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapkan (Badan Pusat Statistik Gunungkidul 2016).

Tingkat kemiskinan di DIY masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama periode 2009-2014, penurunan kemiskinan DIY sebesar 2,68 poin sementara penurunan

rata-rata tingkat kemiskinan nasional sebesar 3,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan DIY masih rendah.

Data tentang anak yang putus sekolah di DIY menurut Badan Pusat Statistik dalam Laporan kinerja Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, pada tahun 2013/2014 paling banyak terjadi pada jenjang SLTP/MTs. Pada jenjang SLTP/MTS, pada tahun 2012/2013 persentase sebesar 0,16%. Kasus anak putus sekolah khususnya di Gunungkidul angka putus sekolah tingkat SMP pada tahun 2013 mencapai 0,05 % atau 76 anak dari 30.768 siswa.(Badan Pusat Statistik Gunungkidul 2016).

Beberapa kasus memang terkait dengan faktor ekonomi, seperti banyaknya anak-anak yang terpaksa bekerja untuk mencari nafkah pada usia sekolah. Namun banyak faktor lain yang menjadi penjelasa putus sekolah, seperti ketersediaan akses dan fasilitas pendidikan yang memadai dan terjangkau. Saat ini, kita juga dihadapkan pada fenomena meningkatnya putus sekolah pada anak karena kejadian kehamilan yang tidak dikehendaki pada anak-anak. Kajian yang lebih komprehensif perlu dilakukan untuk menjawab akar persoalan dari angka putus sekolah ini. Tetap dibutuhkan upaya pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah ini dalam rangka mencapai pemerataan pendidikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (Laporan kinerja Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014).

Upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya

melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya.

Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, karena siswa-siswa yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya masalah putus sekolah. Hal ini disebabkan karena keadaan perekonomian keluarga siswa yang kurang mendukung, sehingga siswa tersebut memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih bekerja.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar diluncurkan oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurangnya biaya. Dana Kartu Indonesia Pintar

(KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas.

Sumber dana bantuan ini adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P). Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Program Indonesia Pintar ini merupakan penyempurnaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), yang telah bergulir sejak tahun 2008. Kartu Indonesia Pintar juga menjamin anak usia sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu baik yang bersekolah maupun tidak. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP. Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana KIP adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Masalah lain yang terjadi adalah sulitnya pengawasan yang dilakukan, hal ini dikarenakan mekanisme penyaluran dana yang langsung ditransfer ke rekening siswa. Dana tersebut yang mengelola adalah orang tua siswa dan pihak sekolah hanya sebagai implementor sulit mengawasi penggunaan dana tersebut. Pada saat penerimaan dana KIP orang tua siswa tidak dapat mengelolanya dengan baik sehingga, dana KIP menjadi tidak tepat sasaran karena digunakan untuk keperluan pribadi bukan sebagai keperluan pendidikan.

Salah satu sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar adalah SMP N 1 Semin. SMP N 1 Semin terletak di Pundungsari, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun pelajaran 2015/ 2016 terdapat 161 siswa miskin dari sekolah ini yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Masing- masing siswa di sekolah ini menerima bantuan sebesar Rp. 750.000,00 per tahun, dan ada pula Rp. 375.000,00 per semester. Dana tersebut digunakan oleh siswa untuk membeli perlengkapan kebutuhan sekolah, diantaranya untuk membeli alat tulis, tas, sepatu, dan lain- lain. Siswa tersebut mendapat bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikirim dari Pemerintah pusat. Adanya kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari pusat ini mendorong sekolah untuk mengimplementasikannya secara operasional. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan karena dapat memberikan

gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SMP N 1 Semin.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang memiliki prosentase kemiskinan rendah yakni 23,03% atau 157,09 ribu pada tahun 2011 dan menurun menjadi 20,83% atau 148,39 ribu orang pada periode 2014. Penurunan selama tiga tahun tersebut (2,2%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapkan.
2. Mayoritas masyarakat adalah dari kalangan keluarga yang tidak dan atau kurang mampu.
3. Kurang selektif dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar, sehingga masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana KIP serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana KIP.
4. Banyaknya penyalahgunaan dana KIP karena lemahnya pengawasan dari pihak Dinas maupun Sekolah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang luas. Oleh karena itu, pembatasan masalah diperlukan agar masalah dapat diteliti secara jelas, fokus dan terarah. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin Kabupaten Gunungkidul.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/ 2016?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin Kabupaten Gunungkidul?
3. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin?

E. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/ 2016
2. Mendeskripsikan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin.
3. Mendeskripsikan faktor- faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin.

F. Manfaat

1. Manfaat teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan serta menambah kepustakaan dalam dunia pendidikan mengenai implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pendidikan dalam mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Kartu Indonesia Pintar serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Kebijakan Pendidikan

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Pengertian kebijakan menurut Kartasamita dalam Joko Widodo (2008:13), merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah; apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi; dan apa pengaruh dan dampak dari kebijakan tersebut.

Kebijakan adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat menurut Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dalam Arif Rohman (2014:108).

Kebijakan merupakan suatu kata benda asli dari deliberasi mengenai tindakan (*behavior*) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi tindakan tersebut menurut H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, 2008: 140.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian program pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan untuk memecahkan masalah atau hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pendidikan

Menurut Dwi Siswoyo (2011:17) pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya, daya jiwanya (akal, rasa dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya. Pendidikan merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam mempengaruhi kemampuan, kepribadian dan kehidupan individu dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesama dan dunia, serta dalam hubungannya dengan Tuhan.

Menurut Riant Nugroho (2008:20), pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melekat kepada setiap kehidupan bersama, atau dalam bahasa politik disebut sebagai “Negara-bangsa”, dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupan.

Pendidikan menurut Redja Mudyahardjo dalam Rulam Ahmadi (2014:37) adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu.

Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Setiap dimensi kehidupan (pembangunan) memiliki tujuan masing-masing dan semua dimensi itu motor penggerakannya adalah manusia yang memilih, menentukan, dan melaksanakan pilihannya guna untuk mencapai tujuan hidup, baik tujuan kehidupan manusia secara umum maupun tujuan hidup secara spesifik (Rulam Ahmadi, 2014: 49).

Tujuan pendidikan menurut A Tresna Sastrawijaya (1991) dalam Abdullah Idi (2013: 61) adalah mencakup kesiapan jabatan, ketrampilan memecahkan masalah, penggunaan waktu senggang dan sebagainya, karena setiap siswa mempunyai harapan yang berbeda. Sementara itu, tujuan pendidikan dengan bidang studi dapat dinyatakan lebih spesifik. Misalnya, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tulisan tujuannya untuk membantu siswa berpartisipasi dalam masyarakat.

Dalam sumber yang sama, S. Nasution (2009) mengatakan bahwa pada dasarnya setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Namun, pendidikan di sekolah sering kurang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum kebanyakan berpusat pada bidang studi yang tersusun secara sistematis. Pelajaran tersebut hanya untuk memenuhi kepentingan sekolah dalam menghadapi ujian, bukan membantu anak hidup efektif dalam masyarakat.

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk dan menciptakan masyarakat sesuai yang diharapkan. Pendidikan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat melalui anak didik sebagai penerus masa

depan. Salah satu peranan pendidikan dalam masyarakat adalah fungsi sosial yakni merupakan salah satu sarana pendidikan yang diharapkan masyarakat.

Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai terhadap tatanan tradisional masyarakat berfungsi sebagai pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk iman dan taqwa, meningkatkan kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wawasan anak, sehingga dapat membawa kemajuan individu, masyarakat dan Negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang menumbuhkan pengalaman-pengalaman sehingga anak-anak mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dalam perkembangan kehidupannya dan dapat mencapai kebahagiaan.

3. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2008: 140).

Menurut Arif Rohman (2014:108), kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi

berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini menjadi penting dengan meningkatkannya kritisi publik terhadap biaya pendidikan. Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan. Kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik. Kebijakan publik yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara-bangsa di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara bangsa secara keseluruhan menurut Riant Nugroho (2008:37).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik dalam bidang pendidikan dalam perumusan visi dan misi pendidikan serta efisiensi biaya untuk mencapai tujuan pendidikan.

4. Proses Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Oleh karena itu, tahapan dari kebijakan pendidikan sama dengan tahapan pada kebijakan publik. Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam AG Subarsono (2005: 13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut: Penyusunan agenda (*agenda*

setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil, evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

B. Implementasi Kebijakan Pendidikan

1. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi dalam Webster's Dictionary (Arif Rohman, 2009:134), menyatakan bahwa “implementasi diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Dari pengertian diatas bahwa suatu implementasi kebijakan merupakan suatu metode/cara dengan menggunakan alat dan sarana untuk menghasilkan suatu dampak /hasil dari keputusan kebijakan. Biasanya wujud dari keputusan kebijakan ini berupa ketetapan yang dibuat oleh pemerintah.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Lebih lanjut Mazmanian & Sabatier dalam Joko Widodo (2006: 88) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Selanjutnya, M. Grindel dalam Arif Rohman (2001: 84) menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas

“membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah”. Seperti tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, Seorang ahli yang bernama Charles O. Jones mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas-aktifitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: i) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; ii) interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; iii) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Arif Rohman, 2001:84-85).

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari sasaran kebijakan, aktivitas, kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses implementasi adalah suatu metode dengan menggunakan alat dan saran untuk menghasilkan dampak dari keputusan kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau

dilihat dari proses dan pencapaian tujuan dari hasil akhirnya, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang hendak diraih.

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses menjalankan keputusan kebijakan. Implementasi juga berarti sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu (Arif Rohman, 2009: 206). Dimana pelaksanaan implementasi ini dibentuk melalui pengorganisasian sehingga membentuk suatu tugas-tugas yang berbeda antar personel untuk menghasilkan kebijakan yang direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah.

Peter De Leon Linda De Leon mengemukakan bahwa teori-teori dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga generasi yaitu generasi pertama yaitu memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi diantara kebijakan dan eksekusinya, lalu generasi yang kedua yaitu memahami implementasi kebijakan sebagai tugas yang diperintah dari atasan untuk birokrasi bawahnya yang sifatnya berupa kewajiban untuk dilaksanakan, dan generasi yaitu memahami bahwa proses keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh aktor/pelaksana kebijakan itu sendiri (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008:212).

Dalam semua kegiatan implementasi kebijakan, menurut Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009:160) menyatakan bahwa selalu ada dua aktor yang terlibat didalam implementasi, yaitu :

- a. Beberapa orang di luar para birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas implementasi;
- b. Para birokrat sendiri yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping tugas-tugas implementasi;

Dua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan implementasi (*constituents*) serta pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok kepentingan (*intersif groups*). Unsur yang terkait dalam implementasi kebijakan adalah target group atau kelompok sasaran. Dimana kelompok sasaran itu adalah sekelompok orang yang menerima hasil dari aktivitas implementasi. Pihak-pihak yang tergabung dalam implementasi yaitu para pelaku dan pengguna kebijakan, dalam hal ini yaitu pembuat kebijakan yang terlibat dalam kelompok aktivitas kepentingan kebijakan dan juga kelompok sasaran pelaksana kebijakan yaitu birokrasi maupun kelompok yang melakukan aktivitas implementasi dari kebijakan dari kebijakan yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan.

2. Teori – teori Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing- masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

a. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Meter dan Horn, dalam AG Subarsono (2005: 99) ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni : standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.
3. Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instalasi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang sempurna itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi.

b. Teori Implementasi George C. Edwards III (1980)

Menurut Joko Widodo (2006:96) teori implementasi dari Model Edward III (1984:10) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor *communication, resources, dispositions, dan bureaucratic structure*.

1. Faktor komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

2. Sumber Daya

Edward III (1980:11) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III (1980:11) menegaskan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan- ketentuan atau aturan- aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Van Horn & Van Matter (1974) juga menyatakan bahwa sumberdaya sebagaimana telah disebutkan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.

3. Disposisi

Edward III (1980) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana

para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*cognitive*) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*). Pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman kebijakan ini akan menimbulkan sikap menerima (*acceptance*), acuh tak acuh (*neutrality*), dan menolak (*rejection*) terhadap kebijakan. Sikap itulah yang akan memunculkan disposisi pada diri pelaku kebijakan. Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan (Edward III, 1980:53).

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980:125), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek- aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Dimensi fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, di mana para pelaksana kebijakan akan mempunyai kesempatan yang besar berita/instruksi nya akan terdistorsi. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yurisdiksi tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya langka.

c. Menurut Teori Hogwood dan Gunn

Dua ahli yang bernama Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn ini oleh para ahli ilmu politik dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan '*the top down approach*'. Menurut kedua ahli ini, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (perfect implementation), maka dutuhkan banyak syarat. Syarat-syarat tersebut adalah: Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; perpaduan sumber – sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; hubungan saling ketergantungan harus kecil; adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Arif Rohman, 2001: 86).

C. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar

Kartu Indonesia Pintar merupakan bantuan dari pemerintah untuk siswa kurang mampu/ miskin, dengan harapan mengurangi anak putus sekolah. Pada buku pedoman pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar telah dijelaskan meliputi pengertian, landasan hukum, tujuan, sasaran, besaran dana, sumber dana, pemanfaatan dana, mekanisme penetapan dan penyaluran KIP, mekanisme pengambilan KIP, tugas dan tanggung jawab sekolah.

1. Pengertian

Program Indonesia Pintar melalui KIP menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Indonesia Pintar melalui KIP merupakan penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin

(BSM). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut KIP adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda/ identitas untuk mendapat manfaat PIP.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh direktorat jenderal terkait, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/ kota, dan satuan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing- masing.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus

sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.

2. Dasar Hukum

Pelaksanaan PIP 2015 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- i. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta perubahannya;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/ Lembaga;
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar;
- q. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-16/PB/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan dan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin dan Beasiswa Bakat dan Prestasi;
- r. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD Tahun 2015 Nomor: 023.03.1.666011/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;
- s. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMP tahun 2015 Nomor: 023.03.1.666032/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;
- t. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMA tahun 2015 Nomor: 023.12.1.666049/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya;
- u. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK tahun 2015 Nomor:

023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 beserta revisinya.

3. Tujuan

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan.
- c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar daerah.
- d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

4. Sasaran

Sasaran PIP adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan :

- a. Penerima BSM 2014 Pemegang KPS;
- b. Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014;

- c. Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS;
- d. Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan;
- e. Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam;
- f. Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*drop-out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
- g. Siswa/anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti: Kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah; SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian (bidang Agrobisnis, Agroteknologi), Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman; peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

Kecuali sasaran yang terdaftar pada SMK bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman, sasaran nomor 1 dan nomor 2 merupakan sasaran yang diprioritaskan.

5. Besaran Dana

Sasaran BSM/KIP 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Sasaran BSM/PIP
SD/Paket A	10.470.610
SMP/Paket B	4.249.607
SMA/Paket C	1.353.515
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

Tabel 1. Besaran Dana

Besaran dana KIP diberikan per peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

a. Sekolah Dasar (SD) / Paket A:

- 1) Peserta didik kelas I,II,III,IV dan V Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 450.000,-;
- 2) Peserta didik kelas VI tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;
- 3) Peserta didik kelas I tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 225.000,-;

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:

- 1) Peserta didik kelas VII dan VIII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 750.000,-;
- 2) Peserta didik kelas IX Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;
- 3) Peserta didik kelas VII Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 375.000,-;

c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket C:

- 1) Peserta didik kelas X,XI dan XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
- 2) Peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
- 3) Peserta didik kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;

d. Sekolah Menengah Kejuruan(SMK):

- 1) Program 3 Tahun
 - i) Peserta didik SMK kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
 - ii) Peserta didik SMK kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
 - iii) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;

2) Program 4 Tahun

- i) Peserta didik SMK kelas X,XI dan XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp. 1.000.000,-;
- ii) Peserta didik SMK kelas XII Tahun Pelajaran 2014/2015 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;
- iii) Peserta didik SMK kelas X Tahun Pelajaran 2015/2016 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp. 500.000,-;

e. Lembaga kursus dan pelatihan

Anak usia sekolah (16 sampai dengan 21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP yang tidak bersekolah dan sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di SKB/PKBM/LKP/BLK atau satuan pendidikan nonformal lainnya, diberikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- selama mengikuti kursus terstandar dalam satu periode kursus dalam satu tahun tanpa pertimbangan waktu kursus.

6. Sumber Pembiayaan

Cakupan program KIP dalam NK-RAPBNP 2015 akan menjangkau 19,2 juta siswa, meningkat hampir 10 juta siswa dari rencana dalam APBN 2015 (BSM). Konsekuensi penambahan cakupan siswa tersebut adalah adanya penambahan alokasi sebesar Rp.7,1 triliun dalam NK RAPBNP 2015 yang dialokasikan untuk penambahan

cakupan penerima serta biaya cetak kartu leaflet dan biaya pengiriman KIP, sehingga total besaran anggaran KIP dalam RAPBN-P 2015 sebesar ±12,9 triliun.

7. Pemanfaatan Dana

Program KIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah;
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
- c. Transportasi siswa ke sekolah;
- d. Uang saku siswa ke sekolah;
- e. Biaya kursus/les tambahan;

8. Mekanisme penetapan dan Penyaluran KIP

a. Mekanisme Penetapan

Penetapan penerima dana KIP 2015 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- 1) Direktorat teknis menerima usulan calon siswa penerima KIP dari dinas pendidikan kabupaten/kota/pemangku kepentingan.
- 2) Direktorat teknis menetapkan siswa penerima KIP yang berasal dari usulan sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dan usulan dari pemangku

kepentingan dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. Untuk usulan SMK yang berada dibawah binaan propinsi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- 3) Siswa SMK penerima KIP yang menempuh studi keahlian kelompok pertanian (agrobisnis dan agroteknologi), perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman yang ada dalam aplikasi dapodik dapat langsung ditetapkan sebagai penerima PIP sepanjang alokasi terpenuhi.
- 4) Untuk peserta paket A/B/C, penetapan penerima PIP dilakukan oleh Direktorat PSD,PSMP,PSMA setelah menerima surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud.
- 5) Untuk peserta balai latihan kerja penetapan penerima KIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK setelah menerima surat keputusan penetapan penerima KIP dari Direktorat Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

b. Mekanisme Penyaluran

Dana BSM/KIP 2015 disalurkan langsung ke peserta didik penerima melalui mekanisme sebagai berikut: Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima KIP 2015 yang tercantum dalam surat keputusan direktur ke lembaga penyalur untuk dibuatkan rekening; Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur; KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di lembaga penyalur; Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada lembaga penyalur untuk menyalurkan/memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dan lembaga penyalur; Direktorat teknis menginformasikan daftar siswa penerima kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan surat keputusan penerima; peserta didik mengambil/mencairkan dana KIP di lembaga penyalur. Penyaluran dana KIP 2015 kepada penerima dilakukan melalui TabunganKu atau *virtual account*.

c. Mekanisme Pengambilan Dana

Pengambilan/pencairan dana KIP 2015 dilakukan oleh peserta didik di lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

SD/Paket A	SMP/Paket B	SMA/Paket C	SMK/Kursus dan Pelatihan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga. 2. Foto copy lembar rapor yang berisi biodata. lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN 3. KTP orang tua/wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga. 2. Foto copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap dengan nama sekolah, NPSN dan NISN 3. KTP orang tua/wali 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga. 2. Kartu pelajar atau identitas pribadi (antara lain KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah) 3. KTP/Kartu Keluarga orang tua/wali bagi peserta didik yang belum memiliki KTP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat keterangan kepala sekolah/ ketua lembaga. 2. Foto Copy lembar rapor yang berisi biodata lengkap 3. KTP peserta didik atau KTP orang tua/wali bagi siswa yang belum memiliki KTP.

Tabel 2. Mekanisme Pengambilan Dana

Khusus peserta didik Paket A/B tidak diwajibkan membawa dokumen biodata yang berisi NISN, menandatangani bukti penerimaan dana PIP 2015 yang disediakan oleh lembaga penyalur, untuk siswa SD, SMP, dan SMK yang belum memiliki KTP, pengambilan dana beberapa peserta didik harus didampingi minimal satu orang guru/orang tua/wali, bagi penerima KIP yang menggunakan TabunganKu hanya

dapat dicairkan oleh bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertulis pada buku tabungan, serta bagi penerima KIP yang menggunakan *virtual account* dan berada di daerah yang sulit untuk mengakses ke lembaga penyalur (tidak ada kantor lembaga penyalur di kecamatan sekolah/tempat tinggal peserta didik sedangkan biaya transport pengambilan lebih besar dari bantuan yang akan diterima), maka pengambilan dana KIP 2015 dapat diambil secara kolektif dengan dikuasakan kepada kepala sekolah/kepala lembaga pendidikan atau bendahara sekolah/bendahara lembaga pendidikan dengan syarat/ketentuan pengambilan kolektif sebagai berikut:

- i. Surat kuasa kolektif dari orang tua siswa penerima KIP 2015 dengan melampirkan dokumen persyaratan pengambilan sesuai ketentuan;
- ii. Sekolah/lembaga pendidikan menyampaikan surat permohonan pencairan kolektif ke dinas pendidikan kabupaten/kota;
- iii. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan pengambilan dana kolektif hanya diberikan kepada sekolah/lembaga pendidikan, tembusan disampaikan kepada direktorat teknis terkait;
- iv. Kepala sekolah yang telah menerima rekomendasi harus membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pengambilan dana KIP 2015 secara kolektif yang ditandatangani penerima kuasa bermaterai;

- v. Penerima kuasa harus menunjukkan identitas seperti KTP atau SIM asli pada saat pengambilan dana secara kolektif;
- vi. Surat keterangan kepala sekolah/ketua lembaga;
- vii. Foto copy halaman biodata raport masing-masing siswa;

Dana yang sudah dicairkan oleh penerima kuasa harus segera diberikan kepada siswa penerima yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pencairan kolektif, dan pelaporan pencairan kolektif dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencairan kolektif ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pengambilan dana untuk siswa SD,SMP, dan SMK dapat diambil pada tanggal 5 sampai dengan 24 setiap bulannya; Minimal saldo pada rekening tabungan adalah sebesar Rp.0;

9. Peran dan Fungsi Sekolah/Lembaga Pendidikan

Peran dan Fungsi Sekolah/Lembaga Pendidikan adalah: menseleksi dan mengusulkan siswa calon penerima dana KIP 2015 dengan pertimbangan siswa berkelainan fisik, siswa korban musibah berkepanjangan, siswa dari orang tua terkena PHK, siswa di daerah konflik sosial, siswa dari keluarga terpidana, siswa dari lembaga penyelenggara pendidikan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), siswa miskin memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara tinggal serumah; menyampaikan informasi kepada siswa penerima bahwa dana PIP telah siap diambil; membuat surat keterangan kepala sekolah

sebagai persyaratan pengambilan dana oleh siswa di lembaga penyalur; memberikan pengarahan kepada siswa penerima dana KIP 2015 perihal ketentuan pemanfaatan dana; memantau proses pengambilan/pencairan dana KIP di lembaga penyalur; Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) yang tidak bersekolah dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP sebagai calon peserta didik/warga belajar untuk diusulkan sebagai calon penerima dana KIP.

D. Pemerataan Pendidikan

1. Konsep dan Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti: 1) meliputi seluruh bagian, 2) tersebar kesegala penjuru, dan 3) sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang siapapun mereka dapat merasakan pelaksanaan pendidikan.

Menurut Supandi,dkk (1988: 4) yang dimaksudkan dengan pemerataan dan keadilan ini mengacu kepada rumusan atau batasan Bronfenbrenner (1973), yang dikemukakan Suzanne Prysor-Jones sebagai berikut :

“ . . . equity to mean social justice, or fairness. It refers to as subjective and ethical judgement. Equality refers to the pattern of distribution of something,

such as income or education, for example. Equality is more objective, descriptive term.”

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting, yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan, *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan. Sementara itu, akses terhadap pendidikan telah adil jika antar-kelompok bisa menikmati pendidikan secara merata (Muhammad Rifai, 2011: 136).

Mengutip pernyataan Coleman dalam bukunya *Equality of Educational Opportunity*, secara konseptual konsep pemerataan adalah pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Di dalam pemahaman seperti ini, pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tetapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar berwujud secara optimal.

Dengan demikian, dimensi pemerataan pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut: *Equality of access*, *Equality of survival*, *Equality of output*, *Equality of outcome*.

Sejak tahun 1984, pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini tampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi *equality of access*). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi *equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Sementara itu, Taufikurrachman Saleh memberikan kontribusi tentang bagaimana pola kebijakan pendidikan nasional agar bisa terjadi pemerataan. Salah satu di antaranya harus ada kemauan politik yang sangat keras untuk membuat kebijakan pemerataan pendidikan yang berpihak pada rakyat. Kemudian, harus ada kebijakan di tingkat makro dengan strategi subsidi silang di semua jalur serta jenjang pendidikan di Indonesia. Keluarga kaya diwajibkan memberikan biaya pendidikan dan subsidi terhadap siswa dari keluarga miskin.

Murid-murid dari keluarga tidak mampu harus diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Jika perlu, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) harus diganti dengan PSS (Pembayaran Subsidi Silang). Strategi demikian barangkali akan mejadi salah satu alternatif yang lebih adil untuk pemeratakan kesempatan belajar serta pemerataan mutu pendidikan.

Namun, subsidi silang tidak akan bisa berjalan tanpa ada dukungan pemerintah yang berupa kebijakan yang mampu mengimplementasikannya. Juga, perlu ada *political will* dari semua pihak, terutama pemerintah dan legislatif, untuk melaksanakan program tersebut. Program itu harus dilakukan secara revolusioner, tidak boleh setengah hati.

Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.

Dalam propernas tahun 2000-2004 yang mengacu kepada GBHN 1999-2004 mengenai kebijakan pembangunan pendidikan pada poin pertama menyebutkan:

“Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya Manusia

Indonesia berkualitas tinggi dengan peninggkatan anggaran pendidikan secara berarti“.

Pada salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan Indonesia adalah untuk pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan bagi setiap warga negara.

Pemerataan pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan *education for all*.

Pemerataan pendidikan di Indonesia secara konseptual konsep pemerataan yakni : pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberi kesempatan kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya (Sismanto , 1993 : 31). Dalam pemahaman seperti ini pemerataan pendidikan mempunyai makna yang luas tidak hanya persamaan dalam memperoleh kesempatan pendidikan, tapi juga setelah menjadi siswa harus diperlakukan sama guna memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat berwujud secara optimal.

Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Problem kemiskinan menjadi hambatan utama dalam mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, daerah-daerah di luar Jawa yang masih tertinggal juga harus mendapat perhatian guna mencegah munculnya kecemburuan sosial. Pendidikan bukan merupakan kegiatan yang murah, sekalipun pemerintah menyelenggarakan kegiatan pendidikan tidak usah membayar bagi masyarakat umum. Masyarakat bahkan menilai biaya pendidikan sudah menggila, karena biaya pendidikan yang dia lihat jauh diatas kemampuan membayar dan pendapatan riil yang dia terima tiap bulan (Harsono, 2007: 31).

2. Dasar Pemerataan Pendidikan di Indonesia

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 (TAP MPR No. IV/MPR/1999) mengamanatkan, antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem

pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni. Sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni bukan saja mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga menciptakan kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama pada penelitian ini. Berikut penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafuur Kharisma Ramadhan pada tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar (BSM SD) di Kecamatan Sambas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi memang sangat mempengaruhi efektifitas Implementasi Program BSM tetapi faktor eksternal seperti kurangnya partisipasi orang tua siswa sangat mempengaruhi bagi terlaksananya program BSM SD dengan efektif. Sehingga dibutuhkan peningkatan partisipasi dari orang tua siswa miskin tersebut. Implementor dituntut menemukan strategi untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa, seperti meningkatkan koordinasi dengan kepala Desa sebagai pihak yang mengeluarkan kartu KPS sebagai syarat utama penerima BSM.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang dahulu adalah BSM. Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada proses pelaksanaan KIP di Sekolah, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan KIP dalam upaya pemerataan pendidikan. Setting tempat penelitian juga berbeda.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Esnawati pada tahun 2014 dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dilihat dari sasaran, mekanisme, pengusulan, pengambilan dana, dan tugas dan tanggung jawab, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran BSM di SMP N 15 Yogyakarta adalah siswa yang memiliki Kartu BSM sebanyak 15 siswa. Mekanisme pengusulan dimulai dari siswa menyerahkan Kartu BSM ke Guru BK. Guru BK merekapitulasi dan memverifikasi data siswa pemilik Kartu BSM untuk dikirim ke Kemdikbud melalui Disdik Kota Yogyakarta. Dana BSM diambil secara kolektif oleh Guru BK dengan membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh siswa. Dana BSM diserahkan oleh Guru BK kepada siswa dan disaksikan oleh orang tua siswa. Dana BSM dimanfaatkan oleh siswa untuk membeli sepatu, seragam, alat tulis, tas, dan pianika. Faktor pendukung implementasi: informasi yang diberikan secara rutin dari dinas ke sekolah, adanya rasa saling percaya terkait pemanfaatan dana, penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu mampu meningkatkan keakuratan sasaran. Faktor penghambat: pelaksana kebijakan di sekolah kurang

beradaptasi dengan mekanisme baru, kurangnya pembinaan bagi siswa penerima bantuan, sulitnya mengumpulkan kuitansi pemanfaatan dana BSM dari siswa, terbatasnya dokumen atau arsip sekolah terkait BSM.

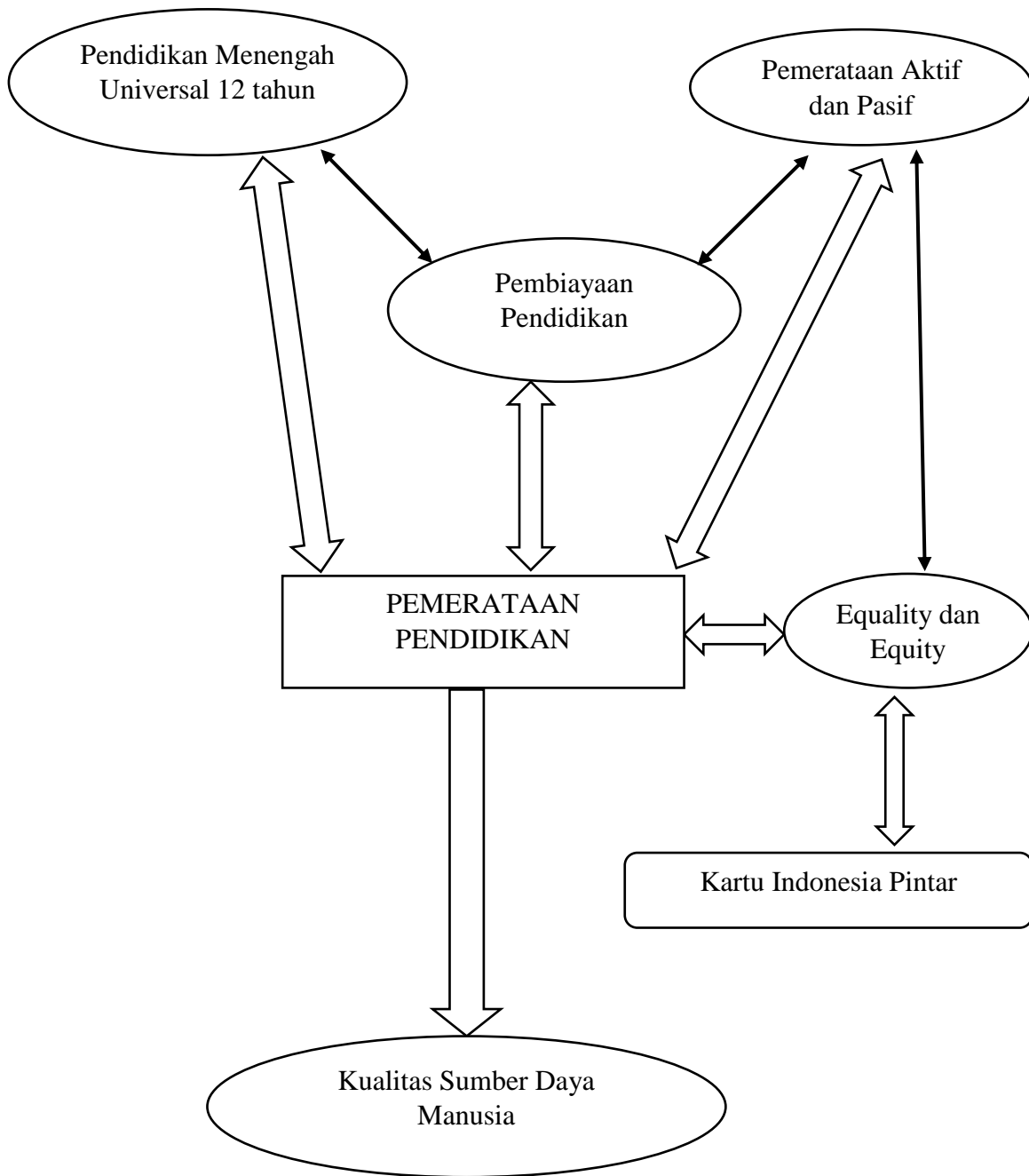
Adapun hasil penelitian yang dibuat oleh Sri Esnawati adalah implementasi KIP, adapun persamaan yang dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan pelaksanaan KIP di Sekolah. Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada proses dan mekanisme KIP, sedangkan peneliti implementasi KIP dalam upaya pemerataan pendidikan.

F. Kerangka Pikir

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pemerataan pendidikan dilakukan dengan upaya agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati pendidikan tanpa mengenal usia, waktu, tempat mereka tinggal yakni baik di kota maupun desa tetap sama.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan kebijakan Kartu Indonesia Pintar sebagai salah satu upaya perluasan pemerataan pendidikan dengan membentuk Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu dari tingkat Sekolah Dasar hingga sekolah Menengah Atas. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapatlah dirumuskan dalam bagan kerangka pikir pada gambar berikut:



Bagan 1. Kerangka Pikir

G. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SMP N 1 Semin?
3. Bagaimana pengorganisasian kebijakan KIP di SMP N 1 Semin?
4. Bagaimana interpretasi kebijakan KIP di SMP N 1 Semin?
5. Bagaimana aplikasi kebijakan KIP di SMP N 1 Semin?
6. Bagaimana mekanisme kebijakan Kartu Indonesia Pintar tahun pelajaran di SMP N 1 Semin?
7. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin?

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi, serta kompleksitas.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004: 29) pendekatan kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang obyek kajian sebagai suatu sistem, artinya obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada.

Penelitian ini berjudul “implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin”. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan ingin mengetahui gambaran lebih dalam terkait dengan implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan serta dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam implementasinya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bermaksud untuk mendeskripsikan

keterangan tentang data yang didapat dari lapangan berupa data tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang diteliti. Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin Kabupaten Gunungkidul.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Oleh karena itu, subyek yang diperlukan pada penelitian ini adalah Staff Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mengurus Kartu Indonesia Pintar, Kepala Sekolah, siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta orangtua siswa penerima KIP.

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Pada obyek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (*activity*) orang-orang (*actors*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu (Sugiyono, 2007:215). Obyek dari penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun ajaran 2015/ 2016.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Tempat penelitian tergantung pada bidang ilmu yang melatarbelakangi studi tersebut. Setting pada penelitian haruslah jelas sehingga dapat melakukan penelitian dengan efektif dan akurat (Sukardi, 2003: 53).

Menurut Burhan Bungin (2001: 148) penentuan tempat dan waktu penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selanjutnya, dipertimbangkan apakah lokasi dan setting penelitian memberi peluang yang menguntungkan untuk dikaji dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu SMP di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul yaitu SMP N 1 Semin. Alasan pemilihan sekolah tersebut adalah karena penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin tahun 2015/ 2016 ini cukup banyak yakni 161 siswa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diinginkan (Sugiyono, 2010 : 62). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Lexy J. Moleong (2009: 175) secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek peneliti, hidup pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Indonesia Pintar

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186).

3. Studi Dokumen

Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data tentang hasil laporan kegiatan program pendukung aplikasi instrumentasi yang telah dilakukan sebelumnya guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan kendala apa saja yang dialami selama ini.

F. Instrumen Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002: 136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu sendiri, namun demikian kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti diposisikan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data dan sekaligus peneliti menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen penelitian ini, selain menggunakan penulis juga dengan membuat pedoman observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi. Adapun kisi-kisi pedoman observasi, wawancara, dan kajian dokumentasi yaitu sebagai berikut :

1. Pedoman observasi

Observasi digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana praktik implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar.

No.	Aspek yang diamati	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Kondisi lingkungan sekolah	a. Sarana dan prasarana yang berkaitan dengan KIP	Lingkungan sekolah
2.	observasi kegiatan	a. Kegiatan dan pembinaan siswa penerima KIP b. Sosialisasi kegiatan	Lingkungan sekolah
3.	Kondisi lingkungan rumah siswa penerima KIP	a. Lokasi rumah b. Sarana dan prasarana siswa di rumah	Rumah siswa

Tabel 3. Kisi- kisi instrumen observasi

2. Pedoman wawancara

Kisi – kisi pedoman wawancara ini digunakan untuk mengetahui program Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin.

No.	Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan 2. Tahap pelaksanaan KIP 3. Syarat-syarat penerima KIP 4. Pelaku pelaksana program 5. Kesesuaian dengan tujuan 6. Tepat sasaran 7. Struktur birokrasi 8. Kriteria penerima KIP 9. Evaluasi dan pelaporan 10. Kondisi keluarga penerima KIP 11. Jumlah dana KIP 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala sekolah b. Dinas pendidikan c. Guru BK d. Siswa
2.	Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi KIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor internal 2. Faktor eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala sekolah b. Guru

Tabel 4. Kisi- kisi Instrumen wawancara

3. Kisi – kisi pedoman kajian dokumentasi

Kisi-kisi pedoman kajian dokumen digunakan agar peneliti dapat melakukan kajian dokumen sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji berupa buku dan arsip untuk memperoleh data mengenai program beasiswa pada jenjang Sekolah Dasar. Pedoman kajian dokumen tersebut meliputi :

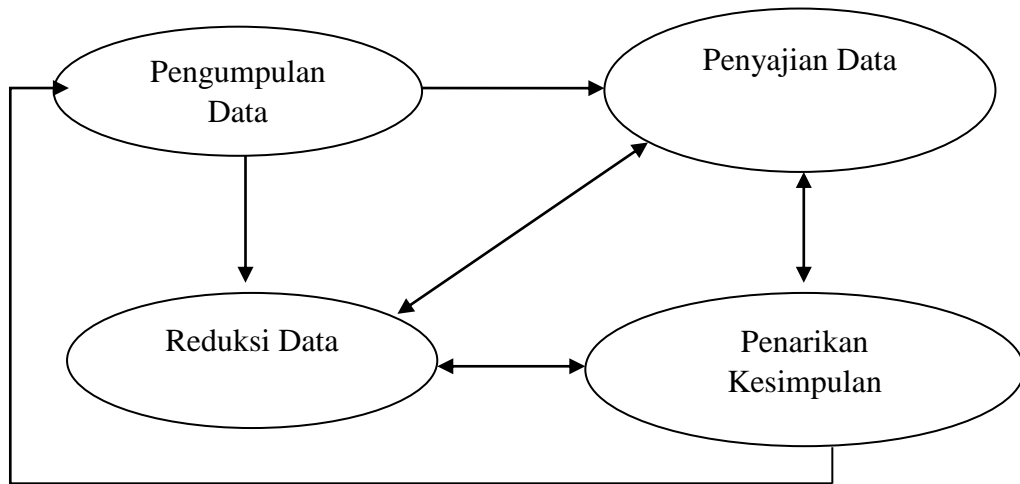
No.	Aspek yang dikaji	Indikator yang dicari	Sumber data
1.	Profil sekolah	a. Visi misi sekolah b. Tenaga pendidik dan kependidikan c. Perkembangan jumlah siswa d. Sarana dan prasarana	Administrasi
2.	Implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar	a. Dokumen kebijakan KIP b. Laporan pelaksanaan c. Juknis mekanisme KIP	Koordinator KIP di sekolah

Tabel 5. Kisi- kisi dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi : *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian

data), dan *conclusion drawing* (*verification* dan penarikan kesimpulan).
(Sugiyono, 2007: 337-345)



Gambar 2. Model Analisis Interaktif Miles and Hubberman

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. *Conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Moleong (2009: 324) untuk menetapkan keabsahan data (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian(*confirmability*). Untuk menjaga keabsahan data, maka yang dipergunakan adalah teknik pengamatan lapangan dan teknik triangulasi data.

Teknik triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Lexy J. Meleong (2009: 330) mengungkapkan bahwa

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan *cross check*, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti yakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil SMP N 1 Semin

1. Identitas Sekolah

SMP Negeri 1 Semin merupakan salah satu sekolah yang berpartisipasi dalam program pemerintah yang berupa Kartu Indonesia pintar. Sekolah ini beralamat di Pundungsari, Semin Gunungkidul, D.I. Yogyakarta. Sekolah ini memiliki NPSN/ No. Statistik Sekolah 201040308015/20402279 dan mempunyai nilai akreditasi A (Amat Baik) dengan skor 95,00. Luas lahan SMP N 1 Semin adalah 11.870 m² (dengan 4.000 m² hak pakai). Sekolah ini memiliki jumlah rombel 15 yang terdiri dari 5 kelas pada setiap jenjang.

2. Visi dan Misi Sekolah

a. Visi

Visi SMP N 1 Semin yaitu “Unggul dalam Prestasi, Terampil, Berwawasan Lingkungan, Berpijak pada Budaya Bangsa Berdasar Iman dan Taqwa“

b. Misi

Misi sekolah ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan Pengembangan Kurikulum Berstandar Nasional.
- 2) Melaksanakan Proses Pembelajaran dan Bimbingan secara terjadwal, efektif dan efisien berbasis ICT.

- 3) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh Warga Sekolah.
- 4) Mendorong setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, agar berkembang secara optimal.
- 5) Menumbuhkan wawasan pengetahuan yang cerdas sebagai dasar untuk menjadi manusia yang berkepribadian, mandiri, berakal, bermoral, berketerampilan, bertaqwa dan berbudaya.
- 6) Mendorong dan menumbuhkan semangat belajar dan berprestasi dalam bidang olahraga, seni, komputer dan imtaq.
- 7) Menumbuhkembangkan kepercayaan pada diri siswa agar berlaku disiplin dan memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan Budaya Bangsa.
- 8) Melakukan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Standar Pembiayaan.
- 9) Melaksanakan Penilaian Berdasarkan Standar Penilaian.
- 10) Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan sarana dan prasaran atau fasilitas pendidikan sesuai dengan standar sarana dan prasaran.
- 11) Meningkatkan mutu kelembagaan dan manajemen dengan membangun kemandirian sekolah dalam pelayanan administrasi, melaksanakan SPM, serta efektifitas sistem monitoring, evaluasi dan supervisi.

12) Menumbuhkan pola hidup kebudayaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

3. Keadaan Sekolah

SMP N 1 Semin berlokasi di Pundungsari Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul. SMP N 1 Semin terletak di tengah pemukiman penduduk desa yang tidak begitu ramai sehingga suasana di sekolah tidak terganggu oleh bisingnya lalu lintas, dan proses pembelajarannya juga dapat terlaksana dengan tenang. Hal tersebut juga di dukung dengan lahan sekolah yang hijau yaitu adanya taman di depan kelas-kelas serta lapangan di depan sekolah sehingga terkesan sejuk dan segar.

Kultur akademik yang diterapkan di sekolah ini juga sangat baik, di sudut- sudut ataupun ditembok tempat strategis di pasang kata- kata yang mampu memotivasi bagi yang membaca. Tempat sampah tersedia di berbagai tempat dan warga sekolah juga tertib saat membuang sampah pada tempatnya. Fasilitas yang ada seperti mushola, laboratorium, mading, dan sebagainya terawat dengan baik. Warga sekolah termasuk di dalamnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, staf Tata Usaha, guru, siswa dan warga sekolah lainnya sangat ramah terhadap sesama warga sekolah serta tamu yang datang ke sekolah tersebut.

4. Sumber daya guru yang dimiliki

Berdasarkan dari data yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian, sumber daya yang dimiliki oleh SMP N 1 Semin diantaranya adalah sebagai berikut: Tenaga pendidik, peserta didik, karyawan serta sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah.

a. Keadaan tenaga pendidik dan karyawan di SMP N 1 Semin

Kelengkapan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sangat mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Ketersediaan sumber daya yang cukup dan kompeten akan mendukung efektivitas proses pembelajaran maupun program- program yang lainnya. Jumlah tenaga pendidik di SMP N 1 Semin sebanyak 33 guru. Sedangkan jumlah karyawan di SMP N 1 Semin sebanyak 10 orang.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Status Guru				Jumlah
		GT/PNS		GTT/Guru Bantu		
		L	P	L	P	
1.	S3/S2	3	-	-	-	3
2.	S1	16	9	4	-	27
3.	D-4	-	-	-	-	-
4.	D3/Sarmud	-	1	-	-	1
5.	D2	-	-	-	-	-
6.	D1	2	-	-	-	2
7.	≤ SMA/ sederajat	-	1	-	-	1
Jumlah		21	11	4	-	36

Tabel 6. Pendidikan terakhir guru(dokumen SMP N 1 Semin)

Tabel 6, memperlihatkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan terakhir guru SMP N 1 Semin yaitu S1 sebanyak 27 orang, untuk S3/S2 sebanyak 3 orang. Sedangkan tingkat pendidikan terakhir yang lainnya masing- masing dalam jumlah yang sedikit yaitu D3 sebanyak 1 orang, D1 sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 1 orang.

b. Keadaan peserta didik

Siswa di SMP N 1 Semin saat ini berjumlah 478 siswa yang dibagi menjadi tiga kelas dan masing – masing kelas terbagi lagi lima rombongan belajar (rombel). Selama lima tahun terakhir terjadi dinamika jumlah siswa yang belajar di SMP N 1 Semin. Berikut data mengenai jumlah siswa di SMP N 1 Semin selama lima tahun terakhir.

Th. Pelajaran	Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls. VII + VIII + IX)	
		Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel	Jml Siswa	Jumlah Rombel
2009/2010	248	160	5	180	5	178	5	518	15
2010/2011	216	159	5	158	5	177	5	494	15
2011/2012	196	150	5	160	5	158	5	468	15
2012/2013	179	150	5	150	5	160	5	460	15
2013/2014	179	150	5	150	5	160	5	460	15
2015/2016	180	160	5	158	5	160	5	478	15

Tabel 7. Data jumlah siswa di SMP N 1 Semin (Dokumen SMP N 1 Semin)

c. Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia merupakan aspek penting yang dibutuhkan oleh peserta didik, disamping perlu juga didukung oleh sarana dan prasarana yang ada di sekolah sehingga tujuan terciptanya sekolah yang berkualitas dapat tercapai. Sarana dan prasarana sekolah dapat membantu memperlancar berbagai kegiatan pendidikan baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Berikut ini merupakan data sarana dan prasarana pendukung akademik maupun non akademik di SMP N 1 Semin yang meliputi:

No.	Ruang	Perabot															
		Meja				Kursi				Almari + rak buku/alat				Lainnya			
		Jml	Baik	Rsk. Ringan	Rsk. Berat	Jml	Baik	Rsk. Ringan	Rsk. Berat	Jml	Baik	Rsk. Ringan	Rsk. Berat	Jml	Baik	Rsk. Ringan	Rsk. Berat
1.	Perpustakaan	30	30	-	-	4 1	4 1	-	-	1 7	1 7	-	-	-	-	-	-
2.	Lab. IPA	9	9	-	-	4 3	4 3	-	-	6	4	2	-	-	-	-	-
3.	Ketrampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Multimedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Lab. Bahasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Lab. Komputer	21	21	-	-	4 2	4 2	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-

7.	Serbaguna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	PTD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Lainnya: AVA	1	1	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 8. Data Ruang Penunjang (Dokumen SMP N 1 Semin)

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/ 2016

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015). Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Program Indonesia Pintar dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, dan Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota nasional masing- masing.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini sebesar Rp. 750.000,00 ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Katam selaku guru BK yang menangani Kartu Indonesia Pintar di SMP 1 Semin bahwa:

“Kartu Indonesia Pintar diberikan khususnya untuk siswa dari keluarga miskin atau sedang terkena bencana atau yatim piatu. Sehingga kehidupan mereka akan berkembang, lebih berbeda pada perkembangan pendidikannya dan kesejahteraan siswa karena yang tadinya tidak bisa jajan menjadi bisa jajan.dalam memanfaatkan dana KIP tersebut siswa menggunakannya untuk membeli buku, alat tulis, seragam sekolah, transportasi ke sekolah, uang saku dan biaya les tambahan siswa.”

Dari ungkapan tersebut bahwa penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi.

Lebih lanjut pendapat dari Bapak Katam selaku guru BK, Bapak Kepala Sekolah juga mengungkapkan:

“Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan untuk siswa miskin atau yang kurang mampu agar mereka tetap bisa bersekolah dengan layak dan tidak kekurangan dalam biaya pendidikannya.”

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan tahun pelajaran 2015/ 2016

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan Wajib Belajar

Pendidikan Sembilan Tahun. Upaya-upaya ini tampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi *equality of access*). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi *equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, amupun letak lokasi geografis.

Murid-murid dari keluarga tidak mampu harus diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Jika perlu, Sumbangan Pembinaan Pendidikan

(SPP) harus diganti dengan PSS (Pembayaran Subsidi Silang). Strategi demikian barangkali akan mejadi salah satu alternatif yang lebih adil untuk pemeratakan kesempatan belajar serta pemerataan mutu pendidikan. Salah satu dari beasiswa tersebut adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar yang mana SMP N 1 Semin ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraannya agar siswa yang bersekolah tidak ada yang merasa terbebani dengan biaya pendidikan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat dari tiga aspek menurut Charles O. Jones (dalam Arif Rohman, 2001:84-85) yang meliputi pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi implementasi Kartu Indonesia Pintar.

a. Pengorganisasian

Sumber daya yang dimiliki SMP N 1 Semin untuk mendukung implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar yang tersedia adalah sumber daya manusia, metode, sumber daya anggaran, serta sumber daya sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Pihak sekolah selalu memperhatikan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta metode atau teknik yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan KIP di sekolah terdapat kepanitiaan tersendiri yang bertugas untuk mengkoordinasikan penyaluran KIP. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak MK :

“Tugas kepanitiaan atau koordinator KIP masuk dalam SK pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dalam pembagian Tugas Guru. Sosialisasi KIP dilaksanakan beberapa kali, yaitu pertama tahun ajaran baru kepada siswa dan wali murid. Kedua jika siswa

sudah ditetapkan sebagai penerima siswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang kemanfaatan dana KIP bagi siswa. Siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair. Disamping itu juga menempel informasi KIP pada papan pengumuman sekolah.” (W/ MK, 18/04/2016).

Berdasarkan pernyataan diatas, tugas koordinator KIP di sekolah masuk dalam SK Kepala Sekolah. Sosialisasi KIP di sekolah dilaksanakan pada tahun ajaran baru kepada siswa dan wali murid. Kemudian siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima siswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang manfaat dana KIP bagi siswa. Siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair.

Sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar adalah anak berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan: Penerima BSM 2014 Pemegang KPS, Siswa/anak dari keluarga pemegang KPS/ KKS/ KIP yang belum menerima BSM 2014, Siswa/anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) non KPS, Siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti Sosial/Panti Asuhan, Siswa/anak yang terkena dampak bencana alam; Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang tidak bersekolah (*dro-out*) yang diharapkan kembali bersekolah. Membahas mengenai implementasi Kartu Indonesia Pintar, bapak MK selaku guru BK yang menangani Kartu Indonesia Pintar mengungkapkan bahwa:

“Penerima Kartu Indonesia Pintar berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu, dengan jarak tempat tinggal ke

sekolah berkisar 5 atau 6 kilometer, orangtua sebagian buruh, mempunyai penghasilan tidak tetap dan pasti mereka ini memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai syarat memperoleh KIP. Sistem penyeleksian dari sekolah juga hanya menyeleksi berdasarkan kepemilikan KPS dari orangtua siswa” (W/ MK, 18/04/2016).”

Siswa yang diseleksi dari sekolah berdasarkan kepemilikan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Pada tahapan ini biasanya hanya siswa yang memiliki KPS saja yang diajukan untuk menerima KIP. Hal yang sama dikemukakan oleh Ibu Nur selaku orang tua siswa bahwa:

“Anak saya mendapat Kartu Indonesia Pintar karena syaratnya adalah memiliki KPS dan saya memilikinya. Kami sangat senang dan gembira sekali dengan mendapat bantuan tersebut karena dapat meringankan beban kami “(W/ NR, 22/05/2016).”

Siswa yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ditangani oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibawah oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan penerima dana tersebut dengan menggunakan Basis Data Terpadu serta Data Pokok Pendidikan yang berisi identitas siswa seluruh Indonesia. Setelah mempertimbangkan dan menetapkan sasaran, maka Kartu Indonesia Pintar akan dikirim ke alamat orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan melalui kantor pos.

Tanggapan lain dari bapak Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa:

“Untuk bisa mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar, siswa harus memiliki Kartu Indonesia Pintar yang dikirim melalui kantor pos yang diserahkan langsung ke alamat rumah orang tua siswa dan memiliki surat keterangan miskin yaitu Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kalau tidak memiliki KPS namun siswa tersebut sangat membutuhkan ya diusulkan” (W/ KS, 25/ 04/2016).

Siswa yang sudah menerima Kartu Indonesia Pintar kemudian membawa ke sekolah tempat siswa bersekolah. Siswa mengumpulkan KIP tersebut kepada Guru BK untuk di rekapitulasi dan verifikasi dengan mencocokkan antara kartu dengan kondisi siswa yang sebenarnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Apabila kondisi siswa telah memenuhi kriteria yang ditentukan, maka siswa diusulkan sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar dengan cara online.

Namun peneliti memiliki keterbatasan dalam memperoleh dokumen yang mendukung, khususnya dokumen Kartu Indonesia Pintar yang tidak dapat ditunjukkan oleh siswa dan sekolah. Sekolah tidak memiliki *copy*-an dokumen tersebut karena langsung diserahkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kabupaten Gunungkidul untuk di kirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Keberadaan Kartu Indonesia Pintar yang tidak bisa dilacak, mendorong peneliti untuk mencari kriteria lain, yaitu siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya. Peneliti mempunyai

inisiatif untuk mendatangi ke rumah empat orang siswa penerima Kartu Indonesia Pintar. Tujuan peneliti datang ke rumah siswa adalah untuk melihat bagaimana kondisi kehidupan mereka.

Kondisi tempat tinggal mereka memang belum dapat dikatakan layak. Satu siswa yang bernama AP tinggal di dekat perbukitan dengan rumah yang sangat kecil. Ibunya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar tradisional dengan penghasilan tidak tetap, sedangkan ayahnya bekerja serabutan. Siswa kedua bernama VN tinggal di perbukitan dengan rumah yang sederhana. orangtuanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan tidak tetap karena bekerja hanya pada saat dibutuhkan. Siswa ketiga bernama GA tinggal di rumah yang sederhana bersama ibunya yang ayahnya sudah meninggal. Ibunya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar tradisional dan jika dibutuhkan juga buruh tani. Siswa yang keempat adalah RE tinggal di desa yang jauh dari kota dengan tempat tinggal cukup sederhana. Ayahnya sebagai buruh tani dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga. Hal – hal tersebut dapat menunjukkan bahwa keluarga siswa tersebut memang berada dalam kondisi yang serba kekurangan. Sehingga sangatlah tepat apabila anak- anak mereka mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

b. Interpretasi

Mekanisme awal pengusulan KIP dimulai dari Guru BK yang melakukan rekapitulasi dan verifikasi terhadap Kartu Indonesia Pintar

yang dibawa oleh siswa kemudian dicocokkan dengan keadaan siswa yang sebenarnya sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Siswa yang diusulkan sebagai calon penerima KIP di SMP N 1 Semin adalah siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar. Siswa yang mendapatkan kartu KIP dan membawa kartu tersebut ke sekolah sebanyak 161 siswa. Kartu tersebut kemudian dibawa siswa ke sekolah dan diserahkan ke Guru BK sebagai koordinator KIP di sekolah. Guru BK bekerjasama dengan TU untuk merekapitulasi dan memverifikasi data usulan siswa.

Pada penelitian ini, peneliti tidak dapat memastikan data dari siswa sudah benar- benar telah direkapitulasi dan diverifikasi oleh guru BK atau tidak karena keterbatasan dokumen sekolah. Padahal apabila dilihat dari administrasi, seharusnya data yang ada cukup banyak.

Mekanisme selanjutnya adalah mengirim data. Data yang telah selesai diverifikasi dan direkapitulasi oleh pihak sekolah diusulkan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya akan diteruskan ke tingkat pusat. Peran sekolah sementara selesai sampai tahap ini karena tahap penetapan siswa penerima KIP dan pencairan dana dilaksanakan oleh pusat. Peran sekolah dimulai kembali setelah turunnya Surat Keputusan (SK) siswa penerima KIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Fotokopi KPS dan Kartu KIP

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan kartu KIP yang sudah di fotokopi diserahkan langsung oleh siswa ke Guru BK sekolah (bukan Kepala Sekolah ataupun Wakil Kepala Sekolah) dan direkapitulasi dan diverifikasi kebenarannya.

2) Usulan lain

Pemerintah memberikan kesempatan bagi sekolah untuk mengusulkan siswa lain di luar pemilik Kartu KIP untuk turut diajukan sebagai calon penerima dana KIP. Pihak SMP N 1 Semin juga melaksanakan kesempatan untuk siswa lain, sekolah mengajukan usulan siswa di luar pemegang kartu KIP. Apabila siswa tersebut memang benar-benar kurang mampu namun tidak memiliki kartu KIP. Namun di SMP N 1 Semin lebih memprioritaskan kepada siswa yang memiliki KIP dahulu.

3) Pembuatan Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah

Surat Keputusan (SK) Kepala Sekolah yang berisi daftar nama siswa calon penerima KIP tidak dibuat oleh pelaksana kebijakan di SMP N 1 Semin. Surat Keputusan (SK) yang ada hanya Surat Keputusan yang dibuat langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin.

Dana KIP bagi siswa di SMP N 1 Semin dikirim langsung melalui Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Pengambilan dana

dilakukan setelah turunnya Surat Keputusan (SK) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi daftar nama siswa penerima KIP disalurkan ke sekolah melalui peran dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dinas Pendidikan mengirim SK tersebut ke sekolah untuk di tindaklanjuti pada SK yang terlampir. SK tersebut juga berisi peraturan pengambilan dana KIP melalui kantor pos. Adapun daftar nama siswa penerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin dapat dilihat secara lengkap pada lampiran.

SMP N 1 Semin mengambil dana KIP ke sekolah dengan pihak Bank datang ke sekolah. Penyerahan dana dilakukan oleh pihak Bank ke siswa secara langsung.

c. Aplikasi

Hasil wawancara dari beberapa orang tua siswa menyatakan bahwa mereka sangat merasa beruntung dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar, karena dapat membantu kekurangan mereka dalam membiayai anak-anak sekolah. Orang tua juga mengetahui kegunaan dari dana tersebut adalah untuk membeli alat-alat sekolah dan biaya transportasi ke sekolah.

Di SMP N 1 Semin Kartu Indonesia Pintar ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang kondisi perekonomiannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai anak-anak mereka. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan

alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sumarto selaku staff dinas pendidikan mengungkapkan bahwa:

“Kartu Indonesia Pintar memang ditujukan kepada siswa miskin kemudian uang tersebut dikelola orangtua sendiri. Dan digunakan dalam membiayai pendidikan anaknya misalnya untuk membeli alat tulis, seragam, les tambahan dan transportasi siswa ke sekolah.”

Pengalokasian dana Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak sama seperti anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah. Besaran dana yang diperoleh siswa adalah Rp. 750.000,00 berupa uang tunai langsung diberikan pada siswa.

d. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya Pemerataan Pendidikan di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/2016

1) Faktor pendukung

Penelitian terhadap implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin memiliki beberapa poin penting terkait dengan faktor yang mendukung pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang penting mengenai faktor pendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin:

- a) Adanya informasi yang diberikan pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online membuka informasi 24 jam. Informasi tersebut mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan.
- b) Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 yang mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Sosial sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat dan akurat.
- c) Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya.

2) Faktor penghambat

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) tahun 2015/ 2016. Berikut faktor penghambat implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin:

- a) Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana untuk terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya, sehingga pelaksana

program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.

- b) Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar, mereka bisa lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan sekolah.
- c) Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.
- d) Sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana dari siswa apakah untuk keperluan pendidikan atau hal lain di luar pendidikan karena tidak adanya kuitansi.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan di SMP N 1 Semin, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/ 2016

Kartu Indonesia Pintar adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak

dan/ atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Besaran dana yang diberikan adalah Rp. 750.000,00 per tahun dan Rp. 350.000,00 per semester.

Pemberian bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar maupun bantuan pendidikan lainnya guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Pemerintah memberikan bantuan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak- anak miskin yang rawan putus sekolah agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan mereka. Pengalokasian dana bantuan ini sebesar Rp. 750.000,00 ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, misalnya untuk membeli perlengkapan sekolah, biaya transportasi, uang saku, dan lain- lain.

Penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalam taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Kartu Indonesia Pintar diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi.

Bantuan Kartu Indonesia Pintar diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Bantuan berupa uang tunai agar dapat digunakan siswa untuk membeli peralatan sekolah termasuk biaya transportasi mereka ke sekolah. Sehingga pendidikan mereka dapat layak dan terjamin serta tidak ada lagi adanya siswa yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya pendidikan.

Orang tua siswa dari keluarga yang kurang mampu sangat merasa beruntung dengan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar, karena dapat membantu kekurangan mereka dalam membiayai anak-anak sekolah. Orang tua juga mengetahui kegunaan dari dana tersebut adalah untuk membeli alat-alat sekolah dan biaya transportasi ke sekolah.

Di SMP N 1 Semin Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu dalam keadaan sehari-harinya dan dalam membiayai anak-anak mereka masih kekurangan. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

2. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan tahun ajaran 2015/ 2016

Pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun. Upaya-upaya ini tampaknya lebih mengacu

pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan (dimensi *equality of access*). Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa (dimensi *equality of survival*) menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan dewasa ini dengan Program BOS untuk pendidikan dasar, menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar. Pendanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas, tetapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Pelaksanaan pendidikan yang merata berarti melaksanakan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.

Murid-murid dari keluarga tidak mampu diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa. Strategi demikian barangkali akan menjadi salah satu alternatif yang lebih adil untuk pemerataan kesempatan belajar

serta pemerataan mutu pendidikan. Salah satu dari beasiswa tersebut adalah bantuan Kartu Indonesia Pintar.

Tujuan dari adanya Kartu Indonesia Pintar adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan, serta menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dan antar daerah. Salah satu sekolah di Gunungkidul yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraannya adalah SMP N 1 Semin, agar siswa yang bersekolah tidak ada yang merasa terbebani dengan biaya pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, di SMP N 1 Semin yang menerima dana KIP memang benar dari keluarga yang kurang mampu. Adanya dana KIP keluarga merasa beruntung dapat bersekolah dengan layak serta tidak terbebani dan terancam putus sekolah. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melihat dari tiga aspek yang meliputi kriteria penerima, strategi pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat dari implementasi Kartu Indonesia Pintar.

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan pembeukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan, menurut Charles O. Jones (Arif Rohman,

2001:84). Pengorganisasian meliputi sasaran, sosialisasi, dan sumberdaya. Tugas koordinator KIP di sekolah masuk dalam SK Kepala Sekolah. Sosialisasi KIP di sekolah dilaksanakan pada tahun ajaran baru kepada siswa dan wali murid. Kemudian siswa yang sudah ditetapkan sebagai penerima siswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang manfaat dana KIP bagi siswa. Siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair.

Siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin berjumlah 161 siswa yang seluruhnya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan hasil dari pengamatan, siswa yang menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah memenuhi sekurang- kurangnya satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar juga sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa, karena syarat kepemilikan KIP tersebut juga ditentukan dari kepemilikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Hal ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan Data Pokok Pendidikan dan Basis Data Terpadu cukup efektif sebagai pertimbangan dalam menentukan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari SMP N 1 Semin ini dapat dikatakan layak menerimanya, karena melihat dari hasil penititan dari peneliti yaitu kondisi pekerjaan orang tua

mereka dan tempat tinggalnya masih kurang sejahtera. Tempat tinggal mereka yang dapat dikatakan jauh dari jarak rumah ke sekolah juga menandakan bahwa bantuan KIP sudah tepat sasaran.

Namun, pihak sekolah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan tentang penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), meskipun sebenarnya diperbolehkan.

Siswa yang diseleksi dari sekolah berdasarkan kepemilikan dari Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan Kartu Indonesia Pintar. Pada tahapan ini biasanya hanya siswa yang memiliki KPS saja yang diajukan untuk menerima KIP.

Siswa yang berhak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar ditangani oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibawah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketentuan penerima dana tersebut dengan menggunakan Basis Data Terpadu serta Data Pokok Pendidikan yang berisi identitas siswa salah satunya kondisi keluarga siswa mampu/tidak mampu seluruh Indonesia. Setelah mempertimbangkan dan menetapkan sasaran, maka Kartu Indonesia Pintar akan dikirim ke alamat orang tua siswa dan siswa yang bersangkutan melalui kantor pos. Sehingga siswa yang tadinya tidak dapat bersekolah ataupun karena terhalangnya biaya pendidikan, maka dengan adanya Kartu Indonesia Pintar siswa

dapat sekolah mendapat pendidikan yang layak serta pendidikan dapat merata.

b. Interpretasi

Bukti dari rekapitulasi dan verifikasi data siswa penerima KIP tidak dapat ditelusuri oleh peneliti karena dokumen asli telah dikirim, sedangkan sekolah tidak memiliki arsip dokumen tersebut. Akhirnya hal ini menjadikan kekurangan pada penelitian ini.

Selanjutnya yaitu mengirimkan data usulan tersebut ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap ini sekolah dapat dikatakan berhenti dari proses Kartu Indonesia Pintar (KIP). Proses berhenti ini berlangsung sampai dengan Surat Keputusan siswa penerima KIP sudah diterima oleh sekolah dan dimulai kembali proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait.

Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan Kartu Indonesia Pintar untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan. Sehingga sekolah pun juga mengusulkan siswa lain yang di luar kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan sangat membutuhkan bantuan.

1) Pengambilan dana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kecamatan Semin diambil secara langsung oleh dengan pihak Bank datang ke sekolah. Hal ini dilakukan atas pertimbangan bahwa sekolah tidak mungkin melepaskan 161 siswa penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) keluar sekolah pada saat masih berlangsungnya jam belajar.

Proses penyerahan dana oleh pihak Bank ke tangan siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya diberikan langsung kepada siswa tanpa adanya saksi dari orang tua. Namun meskipun tidak dengan pendampingan orang tua, siswa tetap menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa mereka mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar.

Peneliti melihat bahwa pelaksana kebijakan di sekolah telah memiliki strategi sendiri dalam pengoperasionalan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini. Maka selama proses yang dilakukan dapat berdampak positif, sesuai tujuan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini dapat dipertahankan.

Kartu Indonesia Pintar memiliki dua peran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pertama dari segi aksesibilitas pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerataan dalam mengakses pendidikan sehingga siswa yang berasal dari keluarga

kurang mampu dapat mengakses pendidikan melalui subsidi pemenuhan kebutuhan siswa. Pada akhirnya, tujuan penyelenggaraan pendidikan untuk semua dapat tercapai. Kedua, dilihat dari segi kualitas, dalam jangka panjang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat membantu peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, karena semakin banyak siswa yang sekolah maka semakin banyak pula sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan sehingga dapat bermanfaat.

SMP N 1 Semin sebagai salah satu sekolah yang turut serta mengimplementasikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun pelajaran 2015/ 2016 telah melaksanakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai tujuan yang diharapkan. Sistem organisasi pelaksana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin terdiri Kepala Sekolah, TU, dan Guru BK. Pada dasarnya, sebagai Kepala Sekolah penanggung jawab harus memahami seluk- beluk Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin dengan baik.

Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin pada tahun pelajaran 2015/ 2016 telah diimplementasikan. Meskipun para pelaksana kebijakan di sekolah belum memahami keseluruhan dari adanya program, namun tujuan dari kebijakan telah tercapai, yaitu dalam rangka membantu kebutuhan pendidikan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Seluruh data penelitian yang diperoleh peneliti terkait implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/ 2016 ini telah didukung

dengan proses pengamatan dokumen yang diperoleh serta hasil wawancara yang telah dilakukan dari berbagai sumber yang berbeda-beda.

c. Aplikasi

Aplikasi merupakan faktor berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program, menurut Charles O. Jones (Arif Rohman, 2001: 84). KIP merupakan bantuan pendidikan guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Di SMP N 1 Semin Kartu Indonesia Pintar ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang kondisi perekonomiannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai anak-anak mereka. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa. Pengalokasian dana Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak sama seperti anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah. Besaran dana yang

diperoleh siswa adalah Rp. 750.000,00 berupa uang tunai langsung diberikan pada siswa.

d. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam upaya Pemerataan Pendidikan di SMP N 1 Semin tahun pelajaran 2015/2016

1. Faktor pendukung

Penelitian terhadap implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin memiliki beberapa poin penting terkait dengan faktor yang mendukung pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Berikut beberapa hal yang penting mengenai faktor pendukung keberhasilan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMP N 1 Semin:

- a. Adanya informasi yang diberikan pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online membuka informasi 24 jam. Informasi tersebut mengenai buku panduan, edaran, maupun melalui sosialisasi secara lisan. Walaupun dengan adanya informasi tersebut pihak pelaksana kebijakan di sekolah juga masih kurang memahami kebijakan dengan baik.
- b. Keputusan dari pihak pemerintah pusat untuk menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisi informasi siswa kelas 1 hingga kelas 9 yang mengidentifikasi nama anak, usia, dan alamat rumah tinggal dari pendataan Program Perlindungan Sosial sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima

Kartu Indonesia Pintar (KIP) membantu pemerintah mendapatkan data mengenai keluarga yang miskin dengan lebih tepat dan akurat.

- c. Adanya rasa saling percaya terhadap penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar dari siswa dan orang tua, serta sekolah meskipun tidak adanya pengumpulan bukti berupa kuitansi pengeluaran siswa. Hal tersebut diperkuat dari peneliti saat wawancara dengan orang tua siswa, yang mengaku bahwa uang tersebut memang digunakan untuk kebutuhan sekolah anaknya.
- d. Siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak merasa tertinggal dengan teman-temannya.

2. Faktor penghambat

Peneliti juga telah mendapatkan beberapa poin penting yang menjadi penghambat dalam proses implementasi kebijakan kartu indonesia pintar (KIP) tahun 2015/ 2016. Berikut faktor penghambat implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2015/ 2016 di SMP N 1 Semin:

- a. Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan- perubahan khususnya pada mekanismenya. Hal tersebut mengakibatkan para pelaksana untuk terus melakukan pemahaman terhadap mekanisme baru setiap periodenya,

sehingga pelaksana program terkadang merasa kebingungan dengan adanya mekanisme baru.

- b. Ketika siswa sudah memperoleh dana Kartu Indonesia Pintar, mereka bisa lupa bahwa dana tersebut untuk biaya pendidikan bukan untuk membeli kebutuhan lain yang tidak ada kepentingannya dengan sekolah.
- c. Kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah terpaksa juga tidak membuat laporan penggunaan dana tersebut.
- d. Sekolah tidak dapat mengetahui penggunaan dana dari siswa apakah untuk keperluan pendidikan atau hal lain di luar pendidikan karena tidak adanya kuitansi.
- e. Terbatasnya dokumen Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah sehingga menyulitkan peneliti dalam melakukan studi dokumen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan bahwa

1. Siswa penerima bantuan KIP di SMP N 1 Semin berjumlah 161 siswa yang seluruhnya memiliki KIP. Siswa yang menerima bantuan KIP telah memenuhi satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan.
2. Kepemilikan KIP mendukung pemerataan pendidikan, hal ini ditandai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial serta penetapannya dengan mencocokkan dengan Dapodik.
3. Mekanisme pelaksanaannya ialah sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan untuk diteruskan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima KIP untuk diberikan informasi mengenai hal terkait. Perlu diketahui bahwa sekolah juga dapat mengusulkan nama siswa lain yang di luar kepemilikan KIP untuk turut serta diusulkan sebagai calon penerima KIP dengan sesuai kriteria sasaran yang ditetapkan.
4. Faktor pendukung implementasi KIP: informasi dari pihak dinas secara rutin ke sekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta orang tua terhadap

penggunaan dana KIP, siswa menjadi lebih aktif karena peralatan sekolah dapat terpenuhi. Faktor penghambat: evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penyelewengan dana KIP, kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian dan beragam informasi yang telah diperoleh, maka dari hasil kajian penelitian mengenai implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Bagi pemerintah, diharapkan mekanisme yang berubah disetiap periodenya diikuti dengan sosialisasi yang jelas agar semua pihak dapat melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pemerintah seharusnya membentuk tim monitoring Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena menurut hasil dari wawancara peneliti menjelaskan bahwa dari pihak sekolah maupun dinas tidak ada monitoring. Kemudian pemerintah hendaknya lebih memberikan kewenangan yang luas kepada pihak sekolah agar turut berperan aktif dalam mengambil keputusan kebijakan Kartu Indonesia Pintar.
2. Bagi sekolah
 - a. Mengenai isu peningkatan mutu, diharapkan sekolah dapat melakukan pembinaan bagi siswa penerima KIP dengan intensif agar siswa penerima KIP juga mampu bersaing, sehingga secara tidak langsung

kondisi tersebut membantu meningkatkan mutu pendidikan siswa tersebut.

- b. Sekolah juga diharapkan dalam memberikan dana KIP tidak hanya siswa saja yang menerima, namun juga turut mengundang orang tua siswa agar dapat menyaksikan bahwa anak mereka mendapatkan dana KIP. Meskipun sekolah sudah percaya dengan siswa, namun alangkah lebih baik apabila orang tua juga turut diundang.
- c. Sekolah diharapkan dapat mengelola data, arsip atau dokumen sekolah dan selalu menyiapkan *backup* data. Sehingga apabila suatu saat ditanyakan oleh peneliti atau pihak pelaksana kebijakan, sekolah dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi. (2013). *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abi Surya Prima Satya. (2013). Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di Sanggar Kegiatan Belajar Bantul Kabupaten Bantul DIY. *SKRIPSI*. UNY.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- _____.(2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- _____.(2001). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Badan Pusat Statistik DIY. (2016). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 04/01/34/Th.XVIII,4 Januari 2016*. Diakses dari http://yogyakarta.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd-20160104154139.pdf. Pada Tanggal 29 Februari 2016, pukul 10.20 WIB.
- Badan Pusat Statistik Gunungkidul (2016). Diakses dari <http://gunungkidulkab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/6>. Pada tanggal 25 Februari 2016, pukul 11.00 WIB.
- Burhan Bungin. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Ghafuur Kharisma Ramadhan. (2014). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Sekolah Dasar di Kecamatan Sambas. *Jurnal*. Universitas Tanjungpura.
- Hadi Supeno (1999). *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.
- H.A.R Tilaar & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Widodo. (2006). *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Kusnul Isti Qomah (2014). *Di Gunungkidul 263 anak tak lagi sekolah*.
Diakses dari <http://www.harianjogja.com/baca/2014/05/02/putus-sekolah>

[duh-di-gunungkidul-263-anaktak-lagi-sekolah-505676](#). Pada hari Kamis, 25 Februari 2015 pukul 09.09 WIB.

- Lalu Sumayang.(2003). *Manajemen produksi dan Operasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Laporan Kinerja Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta 2014. Diakses dari http://jogjaprov.go.id/attachments/LKj_2014.pdf. Pada tanggal 29 Februari 2016, pukul 11.00 WIB.
- Lexy J. Moleong. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles. B. mattew & Michael Hubberman. (1992). *Anslisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Rifai (2011). *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muhammad Saroni. (2013). *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Keran Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nanang Fattah. (2012). *Sistem penjaminan mutu pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni Sukarno. (2013). Implementasi Kebijakan Sekolah Dalam Perubahan Kurikulum (Kurikulum Periode 1994, 2004, 2006 & 2013) Di SMA N 2 Wates Kulon Progo Yogyakarta. *SKRIPSI*. UNY.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015.
- Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.
- _____. (2008). *Kebijakan Pendidikan yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rulam Ahmadi. (2014). *Pengantar Pendidikan Asas & Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Solichin Abdul Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sri Esnawati. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMP N 15 Yogyakarta. *SKRIPSI*. UNY.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarwan Danim. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Revisi V, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supandi & Achmad Sanusi (1998). *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Undang – Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Dokumentasi

No	Dokumen / Arsip	Ada	Tidak Ada
1.	Surat Keputusan (SK) mengenai KIP	√	
2.	Pedoman Kartu Indonesia Pintar	√	
3.	Juknis mekanisme KIP	√	
4.	Sejarah dan identitas sekolah	√	
5.	Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah	√	
6.	Program Kerja sekolah	√	
7.	Data jumlah siswa di sekolah	√	
8.	Data jumlah penerima KIP di SMP N 1 Semin	√	
9.	Sistem seleksi dan rekrutmen KIP	√	
10.	Data sarana dan prasarana	√	
11.	Data prestasi sekolah	√	
12.	Laporan pemanfaatan dana KIP		√

Lampiran 2. Hasil Observasi

No.	Aspek yang Diamati	Keterangan
1.	Situasi dan kondisi lingkungan sekolah	Lahan sekolah luas, fasilitas di sekolah lengkap dan sebagian digunakan dengan maksimal. Sekolah yang luas dan berada di tengah desa membuat suasana sekolah sepi dan nyaman, sangat kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.
2.	Kegiatan dan aktivitas siswa penerima KIP	Siswa yang menerima KIP tidak memiliki aktivitas khusus baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Mereka berbaur dengan siswa lain sekolah. Kegiatan belajar mengajar juga sama dengan siswa lain, tidak ada yang membedakan.
3.	Kegiatan dan pembinaan bagi siswa penerima KIP	Tidak ada kegiatan pembinaan khusus untuk bagi siswa penerima KIP. Guru BK hanya memantau kehadiran dan partisipasi siswa di sekolah.
4.	Sosialisasi KIP di sekolah	Sosialisasi KIP dilakukan dengan cara pada saat tahun ajaran baru kepada siswa dan orang tua siswa di sekolah setelah SK penerima KIP diterima oleh pihak sekolah.
5.	Kondisi keluarga siswa penerima KIP	Kondisi keluarga dari keempat siswa penerima KIP yang dijadikan informan oleh peneliti cukup memprihatinkan. Keempatnya memiliki rumah sederhana dengan penghasilan orangtua yang tidak tetap. Bantuan yang mereka terima tidak hanya melalui pendidikan, namun juga melalui Kartu Menuju

		Sehat (KMS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.
--	--	---

Lampiran 3. Pedoman wawancara

A. Pedoman wawancara untuk kepala sekolah

1. Sejak kapan sekolah ini mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?
2. Adakah kebijakan atau strategi khusus yang diterapkan oleh sekolah terkait Kartu Indonesia Pintar?
3. Bagaimana pemahaman dan tanggapan siswa dan keluarga siswa mengenai program ini?
4. Bagaimana struktur organisasi yang dibentuk untuk mengelola program Kartu Indonesia Pintar?
5. Apakah sistem organisasi KIP di sekolah sudah memadai dan efektif?
6. Apakah ada perbedaan dalam pengaduan sarana dan prasarana yang diterima siswa penerima KIP dengan yang lain?
7. Adakah prasyarat khusus untuk menjadi tim koordinator KIP?
8. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk mendukung program ini?
9. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
10. Bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut?
11. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program KIP? Mengapa?
12. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah demi mensukseskan program ini?

B. Pedoman Wawancara untuk Koordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah

1. Program bantuan atau beasiswa apa saja yang diterima oleh siswa sekolah ini?
2. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan program KIP?
3. Adakah perbedaan antara KIP dengan program bantuan atau beasiswa lainnya di sekolah?
4. Bagaimana mekanisme atau prosedur Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah?

5. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat Keputusan?
6. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator KIP di sekolah?
7. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator KIP di sekolah?
8. Bagaimana sosialisasi KIP kepada siswa?
9. Berapa jumlah siswa penerima KIP pada tahun ajaran baru ini serta *trend* dari tahun ke tahun?
10. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima KIP sejak pertama kali diterapkan sampai sekarang?
11. Berapa jumlah siswa yang diusulkan untuk menerima KIP dan berapa yang diterima?
12. Apa saja kriteria pemilihan siswa penerima KIP?
13. Bagaimana latar belakang sebagian besar siswa penerima KIP di sekolah ini?
14. Berapa dana KIP yang diterima oleh siswa ?
15. Bagaimana sekolah mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima KIP benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima KIP?
16. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima KIP yang tidak termasuk dalam kriteria penerima KIP ataupun tidak memanfaatkan dana KIP sesuai dengan tujuannya?

C. Pedoman Wawancara untuk Siswa Penerima KIP

1. apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?
2. Berasal dari manakah Anda?
3. Apa pekerjaan orangtua Anda?
4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang sekolah?
5. Berapa uang saku Anda?
6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?
7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?
8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai KIP?
9. Mengapa Anda mendapat KIP?
10. Tahukah keluarga Anda mengenai KIP?
11. Apakah Anda merasa senang dapat menerima KIP?
12. Bagaimana respon orangtua mengenai Anda sebagai penerima KIP?
13. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
14. Berapa dana KIP yang Anda terima?
15. Bagaimana pemanfaatan dana KIP Anda selama ini?
16. Tahukah Anda bagaimana pemanfaatan dana KIP Anda?
17. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana KIP Anda?
18. Bagaimana sekolah memantau kegiatan Anda dalam memanfaatkan dana KIP?
19. Hambatan apa saja yang Anda alami selama menerima dana KIP ini?
20. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?
21. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program KIP?
22. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah demi mensukseskan program ini?

D. Pedoman Wawancara untuk keluarga siswa penerima KIP

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang KIP?
2. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat KIP?
3. Apa pekerjaan Anda?
4. Berapa penghasilan per bulan Anda?
5. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
6. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
7. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah mengenai program KIP?
8. Tahukah Anda pemanfaatan dana KIP anak Anda digunakan untuk apa saja?
9. Apakah program KIP ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak Anda?
10. Apa saja saran dan kritik Anda untuk lebih mensukseskan program ini?

E. Pedoman wawancara untuk seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

1. Sejak kapan program KIP ini dilaksanakan ?
2. Adakah perbedaan antara KIP dengan program beasiswa lainnya?
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
4. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat Keputusan?
5. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator KIP di dinas?
6. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator KIP di dinas?
7. Apa saja yang seharusnya menjadi tugas koordinator KIP di sekolah?
8. Bagaimana sosialisasi KIP kepada pihak sekolah maupun masyarakat?
9. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima KIP sejak pertama kali diterapkan sampai sekarang dan *trend* dari tahun ke tahun?
10. Berapa jumlah sekolah yang diajukan untuk turut serta dalam program KIP dan berapa yang diterima?
11. Apa saja kriteria pemilihan siswa maupun sekolah penerima KIP?
12. Berapa dana KIP yang diterima oleh siswa setiap tahunnya?
13. Bagaimana monitoring siswa penerima KIP?
14. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program KIP?
15. Bagaimana dinas mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima KIP benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima KIP?
16. Bagaimana kondisi keluarga siswa penerima KIP? Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diterapkan?
17. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima KIP yang tidak termasuk dalam kriteria penerima KIP ataupun tidak memanfaatkan dana KIP sesuai dengan tujuannya?
18. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program ini?
19. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk sekolah untuk mendukung program ini?
20. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?

Lampiran 4. Transkrip Wawancara yang Direduksi

A. Wawancara untuk Koordinator Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Sekolah

Nama : Katam

1. Program bantuan atau beasiswa apa saja yang diterima oleh siswa sekolah ini?

Pertama itu beasiswa miskin atau yang sekarang menjadi beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa aspirasi yang penyalurannya kepada siswa juga melalui beasiswa KIP.

Bedanya apa pak dengan KIP?

Bedanya itu ya kalau KIP setiap semester tapi kalau beasiswa aspirasi itu tidak selalu ada setiap tahunnya, kadang empat tahun sekali. Terus juga sekolah ini menerima beasiswa bakat dan prestasi. Bakat berupa olahraga atau seni yaitu renang, bela diri, sepakbola. Keempat beasiswa koperasi, koperasi disini koperasi KPRI Tegas.

2. Sejak kapan sekolah mengimplementasikan program KIP?

Kalau KIP baru tahun 2015/ 2016 karena sebelumnya itu BSM atau yang disebut Bantuan Siswa Miskin.

3. Adakah perbedaan antara KIP dengan program bantuan atau beasiswa lainnya di sekolah?

Kalau KIP yang membedakan itu diberikan khusus siswa dari keluarga miskin/ kena bencana/ yatim piatu, sedangkan beasiswa lain bisa dari prestasi akademik maupun non akademik.

4. Bagaimana mekanisme atau prosedur Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah?

5. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat Keputusan?

Itu seleksinya itu hampir enam bulan atau satu semester. Ya rata-rata 3- 4 bulan sampai satu semester.

6. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator KIP di sekolah?

Dituangkan dalam SK pembagian Tugas Tambahan dari Kepala Sekolah.

7. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator KIP di sekolah?

Tugas kepanitiaan atau koordinator KIP masuk dalam SK pembagian Tugas dari Kepala Sekolah dalam pembagian Tugas Guru.

8. Bagaimana sosialisasi KIP kepada siswa?

Dilaksanakan beberapa kali, yaitu pertama tahun ajaran baru kepada siswa dan wali murid. Kedua jika siswa sudah ditetapkan sebagai penerima siswa dikumpulkan dan disosialisasikan tentang kemanfaatan dana KIP bagi siswa. Siapa yang berhak menerima, bagaimana cara mendapatkannya lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah dana cair. Disamping itu juga menempel informasi KIP pada papan pengumuman sekolah.

9. Berapa jumlah siswa penerima KIP pada tahun ajaran baru ini serta *trend* dari tahun ke tahun?

Ada 101 siswa yang kelas 8 dan ada 55 yang kelas 7. Yang sebelumnya 155 siswa dan tahun ini ada 156 siswa.

10. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima KIP sejak pertama kali diterapkan sampai sekarang?

Mestinya ada perkembangan, lebih berbeda ada perkembangan pendidikan dan kesejahteraan karena yang tadinya tidak jajan menjadi jajan.

11. Berapa jumlah siswa yang diusulkan untuk menerima KIP dan berapa yang diterima?

Usulan 2015/ 2016 156 siswa ya yang diterima juga 156 siswa.

12. Apa saja kriteria pemilihan siswa penerima KIP?

sama yang dibuku pedoman. Hanya sebagai pertimbangan jumlah keluarga/ saudara, dan jarak jauh siswa ke sekolah.

13. Bagaimana latar belakang sebgaiian besar siswa penerima KIP di sekolah ini?

Dari keluarga miskin/ tidak mampu, tempat tinggal ke sekolah jauh berkisar 5 atau 6 KM. Orangtua sebagian buruh, mempunyai penghasilan tidak tetap.

14. Berapa dana KIP yang diterima oleh siswa ?

Dana yang diterima Rp. 750.000,00 per siswa.

15. Bagaimana sekolah mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima KIP benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima KIP?

Sekolah meminta siswa untuk mengumpulkan KPS beserta FC Kartu Keluarga dan/ SKTM kartu miskin dari Pemerintah setempat. Secara periodik diadakan kunjungan kerumah/ home visit kepada siswa penerima KIP setiap semester.

16. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima KIP yang tidak termasuk dalam kriteria penerima KIP ataupun tidak memanfaatkan dana KIP sesuai dengan tujuannya?

Belum pernah ditemukan tidak adanya kesesuaian antara siswa penerima yang tak termasuk dalam kriteria. Apabila terjadi, tindakan pemerintah itu menghentikan atau mencabut dan dialihkan kepada yang berhak.

B. Wawancara untuk staf Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Nama : Sumarto

1. Sejak kapan program KIP ini dilaksanakan ?
Sejak tahun 2014 sudah di laksanakan, melanjutkan program BSM.
2. Adakah perbedaan antara KIP dengan program beasiswa lainnya?
KIP ditujukan kepada siswa miskin kemudian uang tersebut dikelola orangtua.
3. Bagaimana mekanisme atau prosedur Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
Sekolah mengusulkan ke kemendikbud lewat aplikasi, kemudian nanti dibuatkan SK oleh kemendikbud kemudian dicairkan oleh orang sana.
Yang mengambil siapa?
Siswa didampingi orangtua
4. Berapa lama proses dimulainya seleksi di sekolah hingga turunnya Surat Keputusan?
Ya berapa ya, kira-kira satu bulan, karena itu kan nanti ada home visit, sekolah mengunjungi rumah siswa namun hanya sebagian saja / diambil sampel. Karena kan ada yg sudah punya KPS data-data komplit.
Jadi yang dikunjungi itu yang gak komplit atau gimana?
Ya harusnya kan semua mbak, karena kan untuk cek dirumahnya seperti apa, namun keterbatasan waktu jadi diambil sampel saja.
5. Bagaimana struktur organisasi kepanitiaan atau tim koordinator KIP di dinas?
Ini tidak ada mbak, ini hanya manajemen saja, karena tidak ada anggarannya.
Berarti hanya sosialisasi ya pak?
Iya, sosialisasi saja bayar sendiri dari dinas.
6. Apa saja tugas kepanitiaan atau tim koordinator KIP di dinas?
Secara SK tidak ada, hanya karena dinas itu kan strukturnya kan dinas propinsi dan kemendikbud.
7. Apa saja yang seharusnya menjadi tugas koordinator KIP di sekolah?

Mendata siswa yang memang benar-benar bisa mendapat KIP, mengusulkan, mensosialisasikan kepada orangtua dan memberikan informasi mengenai KIP.

8. Bagaimana sosialisasi KIP kepada pihak sekolah maupun masyarakat?

Yang kita undang kepala sekolah, pada saat mau pengusulan kita undang, bagaimana pengusulannya, kriteria pengusulan, kemudian pencairannya juga kita informasikan.

9. Bagaimana dinamika jumlah siswa penerima KIP sejak pertama kali diterapkan sampai sekarang dan *trend* dari tahun ke tahun?

Meningkat terus.

10. Berapa jumlah sekolah yang diajukan untuk turut serta dalam program KIP dan berapa yang diterima?

111 sekolah.

Berarti yang diterima?

Ya segitu mbak.

11. Apa saja kriteria pemilihan siswa maupun sekolah penerima KIP?

Ada, siswa yang punya KPS. Kalau sekolah tidak ada kriteria. Swasta negeri sama saja.

12. Berapa dana KIP yang diterima oleh siswa setiap tahunnya?

750.000

13. Bagaimana monitoring siswa penerima KIP?

Dari pusat.

14. Bagaimana sistem pelaporan dan evaluasi program KIP?

Tidak ada.

15. Bagaimana dinas mengetahui dengan pasti bahwa siswa penerima KIP benar-benar siswa yang termasuk dalam kriteria siswa penerima KIP?

Ya lihatnya di dapodik, nanti di centang-centang dari kriteria yang ada.

16. Bagaimana kondisi keluarga siswa penerima KIP? Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diterapkan?

Ya Sudah.

17. Apa yang dilakukan pemerintah apabila terbukti ada siswa penerima KIP yang tidak termasuk dalam kriteria penerima KIP ataupun tidak memanfaatkan dana KIP sesuai dengan tujuannya?
Mengembalikan.
18. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program ini?
Yang pertama Data siswa, kondisi siswa, kondisi orangtua, kemudian kondisi alam, karena di Gunungkidul termasuk daerah sulit.
19. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk sekolah untuk mendukung program ini?
Kita berikan informasi 24 jam online, kemudian usulan yang belum cair kita usahakan lewat offline.
20. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?
Belum semua siswa miskin terjangkau.
21. Apa saran dari Dinas Pendidikan untuk program Kartu Indonesia Pintar?
Penggunaan dana KIP sebaiknya digunakan dengan maksimal, karena ada yang tidak dimanfaatkan dengan maksimal soalnya dikirim langsung yang menerima orangtua. Harusnya ada pelaporannya supaya dana tersebut juga tepat sasaran.

C. Wawancara untuk kepala sekolah

Nama : Azhari

1. Sejak kapan sekolah ini mengimplementasikan kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menerima dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ?
KIP itu sejak 2 tahun yang lalu.
2. Adakah kebijakan atau strategi khusus yang diterapkan oleh sekolah terkait Kartu Indonesia Pintar?
Untuk bisa mendapat KIP, KIP harus memiliki surat keterangan miskin atau KPS. Kalau KPS tidak ada tapi sangat membutuhkan ya kita usulkan.
3. Bagaimana pemahaman dan tanggapan siswa dan keluarga siswa mengenai program ini?
Mendukung, senang, karena dapat meringankan beban orang yang kurang dalam ekonomi.
4. Bagaimana struktur organisasi yang dibentuk untuk mengelola program Kartu Indonesia Pintar?
Dikelola melalui BK, karena BK yang tahu kondisi di lapangan.
5. Apakah sistem organisasi KIP di sekolah sudah memadai dan efektif?
Sudah, ada ketua yaitu pak Katam, bendahara pak Jumadi dan anggota bu Padmi.
6. Apakah ada perbedaan dalam pengaduan sarana dan prasarana yang diterima siswa penerima KIP dengan yang lain?
Beda, sesuai dengan kebutuhan anak, dicairkan melalui BRI ke sekolah di berikan pada siswa. Sekolah hanya memberikan saran, yaitu dana tersebut untuk memberi keperluan belajar.
7. Adakah prasyarat khusus untuk menjadi tim koordinator KIP?
Persyaratannya ya yang tahu kondisi di lapangan yaitu BK.
8. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk mendukung program ini?
Sosialisasi dari Dinas ke Sekolah.
9. Hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaan program ini?

Sementara belum ada. Ya mungkin tidak sesuai dengan permintaan karena keterbatasan kuota dari dirjen.

10. Bagaimana solusi mengatasi hambatan tersebut?

Guru mengadakan iuran/ infaq untuk siswa yang benar – benar membutuhkan, anak yang kehabisan buku dan peralatan sekolah. Kedua mencarikan beasiswa lain.

11. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program KIP? Mengapa?

Sudah, tetapi kami belum puas karena tidak sesuai permintaan sekolah karena kuota dan keterbatasan dana.

12. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah demi mensukseskan program ini?

Satu itu kuota ditambah. Kedua besaran dana juga ditambah.

D. Wawancara untuk Siswa Penerima KIP

Nama : Galih

1. apakah alasan Anda masuk ke sekolah ini?

Sekolah favorit, banyak guru yang dikenal.

2. Berasal dari manakah Anda?

prebutan

3. Apa pekerjaan orangtua Anda?

Ibu Rumah Tangga

4. Transportasi apa yang Anda gunakan untuk berangkat dan pulang sekolah?

motor

5. Berapa uang saku Anda?

Rp. 10.000,00 tapi gak gak selalu, kadang Rp.7000,00

6. Berapa kali Anda tidak masuk sekolah? Mengapa?

3 hari karena operasi.

7. Berapa saudara Anda dan berapa yang masih sekolah?

1

8. Bagaimana pemahaman Anda mengenai KIP?

Membantu murid yang masih kekurangan dalam hal ekonomi.

9. Mengapa Anda mendapat KIP?

Karena punya syarat. Syarat yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat KIP.

10. Tahukah keluarga Anda mengenai KIP?

Tahu.

11. Apakah Anda merasa senang dapat menerima KIP?

Senang.

12. Bagaimana respon orangtua mengenai Anda sebagai penerima KIP?

Cuma tanya uang dapat dari mana.

13. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?

Memiliki.

14. Berapa dana KIP yang Anda terima?

Rp. 375.000,00

15. Bagaimana pemanfaatan dana KIP Anda selama ini?

Membeli kebutuhan sekolah seperti sepatu.

16. Tahukah Anda bagaimana pemanfaatan dana KIP Anda?

Untuk biaya kebutuhan siswa yaitu kebutuhan sekolah.

17. Bagaimana pelaporan pemanfaatan dana KIP Anda?

Tidak dilaporkan.

18. Bagaimana sekolah memantau kegiatan Anda dalam memanfaatkan dana KIP?

Tidak dipantau

19. Hambatan apa saja yang Anda alami selama menerima dana KIP ini?

Tidak ada hambatan.

20. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Tidak ada.

21. Menurut Anda, sudah efektif dan efisienkah mekanisme program KIP?

Sudah baik.

22. Menurut Anda, apa saja saran dan kritik untuk pemerintah dan sekolah demi mensukseskan program ini?

Lebih diringankan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut.

E. Wawancara untuk keluarga siswa penerima KIP

Nama : Nur

1. Bagaimana pemahaman Anda tentang KIP?
Senang dapat membantu kekurangan.
2. Bagaimana respon Anda mengenai anak Anda yang mendapat KIP?
Bisa bermanfaat untuk siswa dan meringankan beban orang tua.
3. Apa pekerjaan Anda?
Pedagang kecil- kecilan.
4. Berapa penghasilan per bulan Anda?
Kurang lebih Rp. 500.000.
5. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai sekolah anak Anda dalam satu bulan dan satu tahun?
Perhari Rp.10.000 jadi kalau perbulan itu Rp. 300.000
6. Apakah keluarga Anda termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)?
Ya.
7. Bagaimana sosialisasi yang diberikan oleh sekolah ataupun pemerintah mengenai program KIP?
Tidak pernah ada sosialisasi.
8. Tahukah Anda pemanfaatan dana KIP anak Anda digunakan untuk apa saja?
Tahu. Untuk membeli alat- alat sekolah, untuk keluarga yang kurang mampu.
9. Apakah program KIP ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak Anda?
Iya.
10. Apa saja saran dan kritik Anda untuk lebih mensukseskan program ini?
Ya kalau bisa beasiswa ini berlanjut dan untuk seterusnya. Tapi juga harus disesuaikan sasarannya. Kadang ada yang sudah mampu tapi masih mendapatkan bantuan tersebut.

Lampiran 5. Catatan Lapangan

Catatan lapangan I

Tanggal :18 April 2016

Agenda : wawancara dengan koordinator KIP SMP N 1 Semin

Peneliti datang ke SMP N 1 Semin dan langsung menemui bapak Katam selaku guru BK yang mengurus KIP di sekolah tersebut. Selama dua jam peneliti wawancara dan berdiskusi dengan narasumber tersebut serta berhasil mendapatkan data- data tambahan dan dokumen sekolah.

Catatan Lapangan II

Tanggal : 20 April 2016

Agenda : wawancara dengan siswa penerima KIP

Pukul 08.30 peneliti tiba di SMP N 1 Semin. Peneliti langsung ke ruang BK dan meminta izin untuk melakukan wawancara dengan beberapa siswa penerima KIP. Peneliti di bantu guru BK untuk memanggil siswa tersebut. Akhirnya siswa peneliti mendapatkan empat siswa penerima KIP yang masing-masing bernama Galih, Vina, Rika, dan Putri Ayu. Peneliti melakukan wawancara di ruang BK karena pada saat wawancara adalah jam pelajaran sehingga supaya tidak mengganggu yang lain. Peneliti juga tidak lupa untuk meminta izin kepada siswa untuk datang kerumah dan menemui orang tua siswa. Setelah mendapat persetujuan dari siswa, peneliti mencatat alamat keempat siswa tersebut untuk memudahkan peneliti mencari rumah mereka.

Catatan lapangan III

Tanggal :21 April 2016

Agenda :Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP N 1 Semin

Peneliti datang ke SMP N 1 semin dan langsung ke ruang BK bermaksud untuk wawancara Kepala Sekolah dengan di antar oleh bapak Katam. Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yaitu implementasi Kartu Indonesia Pintar.

Catatan lapangan IV

Tanggal : 16 Mei 2016

Agenda :wawancara dengan Koordinator KIP di Dinas Pendidikan

Peneliti datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan wawancara dengan bapak Sumarto. Peneliti masuk ke ruang PLF dan bertemu dengan bapak Sumarto. Peneliti berdiskusi sebentar dengan bapak Sumarto dan diberi penjelasan- penjelasan mengenai KIP.

Catatan lapangan V

Tanggal : 22 Mei 2016

Agenda : wawancara dengan orang tua siswa penerima KIP

Peneliti yang telah mendapat alamat masing- masing siswa kemudian mendatangi rumah siswa- siswa tersebut. Peneliti akhirnya mendatangi rumah siswa pertama. Peneliti bertemu dengan ibu Nur, Ibu dari Putri Ayu. Peneliti memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti kepada ibu Nur dan ibu Nur bersedia untuk diwawancarai.

Peneliti datang ke rumah orang tua siswa kedua yang tidak jauh dari rumah siswa pertama. Pada saat sampai di rumah siswa tersebut, orang tua siswa tidak sedang berada di rumah. Peneliti menunggu sebentar karena ibu Tari dari Vina yang ternyata sedang buruh di sawah. Kemudian Ibu Tari datang dan peneliti memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti dan peneliti berhasil mewawancarai beliau saat itu juga.

Catatan lapangan VI

Tanggal : 29 Mei 2016

Agenda : wawancara dengan orang tua siswa penerima KIP

Peneliti mendatangi rumah siswa ketiga bernama Galih dan ibunya adalah Suginem. Sampai di rumah siswa tersebut peneliti memberitahukan maksud dan kedatangan peneliti. Akhirnya peneliti berhasil mewawancarai beliau yang pada saat itu sedang istirahat di rumah.

Peneliti mencari rumah siswa keempat, dengan diantar oleh siswa Putri Ayu akhirnya peneliti menemukan rumahnya. Peneliti masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan bapak Sutris ayah dari Rika. Pada saat itu bapak Sutris sedang istirahat karena pulang dari ladang. Peneliti menjelaskan maksud dan kedatangannya, akhirnya peneliti berhasil mewawancarai beliau.

Lampiran 6. Dokumentasi



berprestasi SMP N 1 Semin



Mading dokumentasi siswa



Pintu Gerbang SMP N 1 Semin



Organisasi SMP N 1 semin



Wawancara dengan orang tua siswa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Universitas Negeri Yogyakarta
Fakultas Ilmu Pendidikan
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id

Nomor : 2544/UN34.11/PL/2016
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan izin Penelitian

5 April 2016

Yth. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPMPT)
Kabupaten Gunung Kidul
Jl. Brijen Katamso No.1, Wonosari Gunung Kidul, DIY
Tlp/Fax (0274) 391942
Website: <http://Kpmpt.gunungkidul.go.id>
Email: Pelayanan @gunungkidulkab.go.id

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Rini Septiani Astuti
NIM : 12110241023
Prodi/Jurusan : KP/FSP
Alamat : Kalialang, RT 02/ RW 02, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul, Yogyakarta

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
Lokasi : SMP N 1 Semin Kabupaten Gunungkidul
Subyek : Kepala Sekolah, Guru / Koordinator KIP, Siswa, Orangtua, Koordinator Pengelola KIP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul
Obyek : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya Pemerataan Pendidikan
Waktu : April-Juni 2016
Judul : Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam Upaya Pemerataan Pendidikan Tahun Pelajaran 2015 / 2016 di SMP N 1 Semin Kabupaten Gunungkidul

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I FIP
3. Ketua Jurusan FSP FIP
4. Kabag TU
5. Kasubbag Pendidikan FIP
6. Mahasiswa yang bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,
Dr. Haryanto, M. Pd.
NIP 196009021987021001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 358/KPTS/IV/2016

Membaca : Surat dari UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA, Nomor : 2544/UN.34.11/PL/2016, hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : **Rini Septiani Astuti NIM : 12110241023**
Fakultas/Instansi : Ilmu Pendidikan / UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Alamat Instansi : Jl. Colombo No.1 Yogyakarta
Alamat Rumah : Kaliaang RT 02/RW 02, Kalitekuk, Semin, Gunungkidul
Keperluan : Izin penelitian dengan judul:"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DI SMP N 1 SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL"

Lokasi Penelitian : SMP N 1 Semin Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : I Made Suatera, M.Si
Waktunya : Mulai tanggal : 08/04/2016 sd. 08/07/2016
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang disimpan dalam keeping compact disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via email ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat email : kpdgungungkidul@ymail.com
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 08 April 2016

An. BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPALA


Dr. AZIS SALEH
NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul ;